

The cover features a solid orange background. At the top, a white outline map of Indonesia is centered. Below the map, the title is written in bold, dark red capital letters. At the bottom, a row of wind turbines is visible against the orange background.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2019

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022 serta mengakselerasikan dengan rencana pencapaian Tahun 2017-2022.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten di masa yang akan datang, Aamiin

Serang

2020

KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN



Ir. H. MOH. YANUAR, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19610101 198802 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Hadir	ii
BAB I Pendahuluan	I-1
I.1 Latar Belakang	I-1
I.2 Maksud dan Tujuan	I-2
I.3 Dasar Hukum Pembentukan OPD.....	I-2
I.4 Kedudukan	I-3
I.5 Tugas Pokok dan Fungsi	I-4
I.6 Tipe Dinas.....	I-4
I.7 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	I-4
I.7.1 Uraian Tugas dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	I-8
I.8 Sumber Daya Manusia	I-31
I.9 Sistematika Penulisan	I-33
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	II-1
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	II-1
2.1.1 Rencana Strategis	II-2
2.1.2 Visi dan Misi.....	II-2
2.1.3 Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ...	II-2
2.1.4 Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-3
2.1.5 Program dan Kegiatan	II-5
BAB III Akuntabilitas Kinerja	III-1
3.1 Evaluasi Kinerja	III-2
3.2 Analisis Pencapaian Kinerja	III-5
3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)	III-24

3.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	III-60
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	III-68
3.4.1 Akuntabilitas Keuangan Sasaran/Program Strategis	III-68
3.4.2 Realisasi Belanja	III-76
3.4.3 Sisa Anggaran	III-83
BAB IV Pentup	IV-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari system perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

LAKIP disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA). Untuk itu, di dalam LAKIP akan diuraikan mengenai history suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berkewajiban menyusun LAKIP tahun 2018 selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, LAKIP ini berisi ikhtisar

pencapaian sasaran strategis sebagai mana telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, capaian kinerja tahun untuk, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.



Gambar 1.1

Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah perwujudan dari pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Banten yang dilaksanakan melalui anggaran APBD Provinsi Banten.



Tujuan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Memberikan gambaran perihal kinerja Pemerintah Provinsi Banten Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019.
2. Memberikan Pertanggung Jawaban/Akuntabilitas terhadap penyelenggaraan program pembangunan yang dilaksanakan, khususnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

1.3 Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD)

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas

daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya mendukung roda pemerintahannya, pemerintah Provinsi Banten telah membentuk dinas-dinas yang diatur dalam Peraturan Daerah Banten No. 8 Tahun 2016 Tanggal 23 November 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan terstruktur,



sistematik, terorganisir, transparan dan akuntabel diperlukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kab/ Kota dalam melayani masyarakat.

Provinsi Banten saat ini dihadapkan dengan laju pertumbuhan yang tinggi dan dinamika pembangunan semakin kompleks. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan kinerja pembangunan di Provinsi Banten menjadi tantangan yang harus dijawab melalui manajemen pemerintahan yang memiliki kinerja yang berkualitas menuju *good governance* mengikuti tahapan proses reformasi birokrasi. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang professional disertai dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik harus terus diupayakan, sehingga kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan daya saing daerah dapat diwujudkan.

1.4 Kedudukan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Provinsi Banten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah.

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan Kewenangan sebagai berikut :



1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
2. Melaksanakan Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
3. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;
4. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman;
5. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
6. Pemberian rekomendasi izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
7. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
8. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
9. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
10. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
11. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
12. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
13. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
14. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



16. Tipe Tugas

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diklasifikasi tipe B. Dinas Tipe B untuk mewadahi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta urusan Pertanahan dengan beban kerja yang sedang.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari 1 (satu) sekretariat dengan 2(dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang yang masing- masing terdiri dari 3(tiga) seksi.

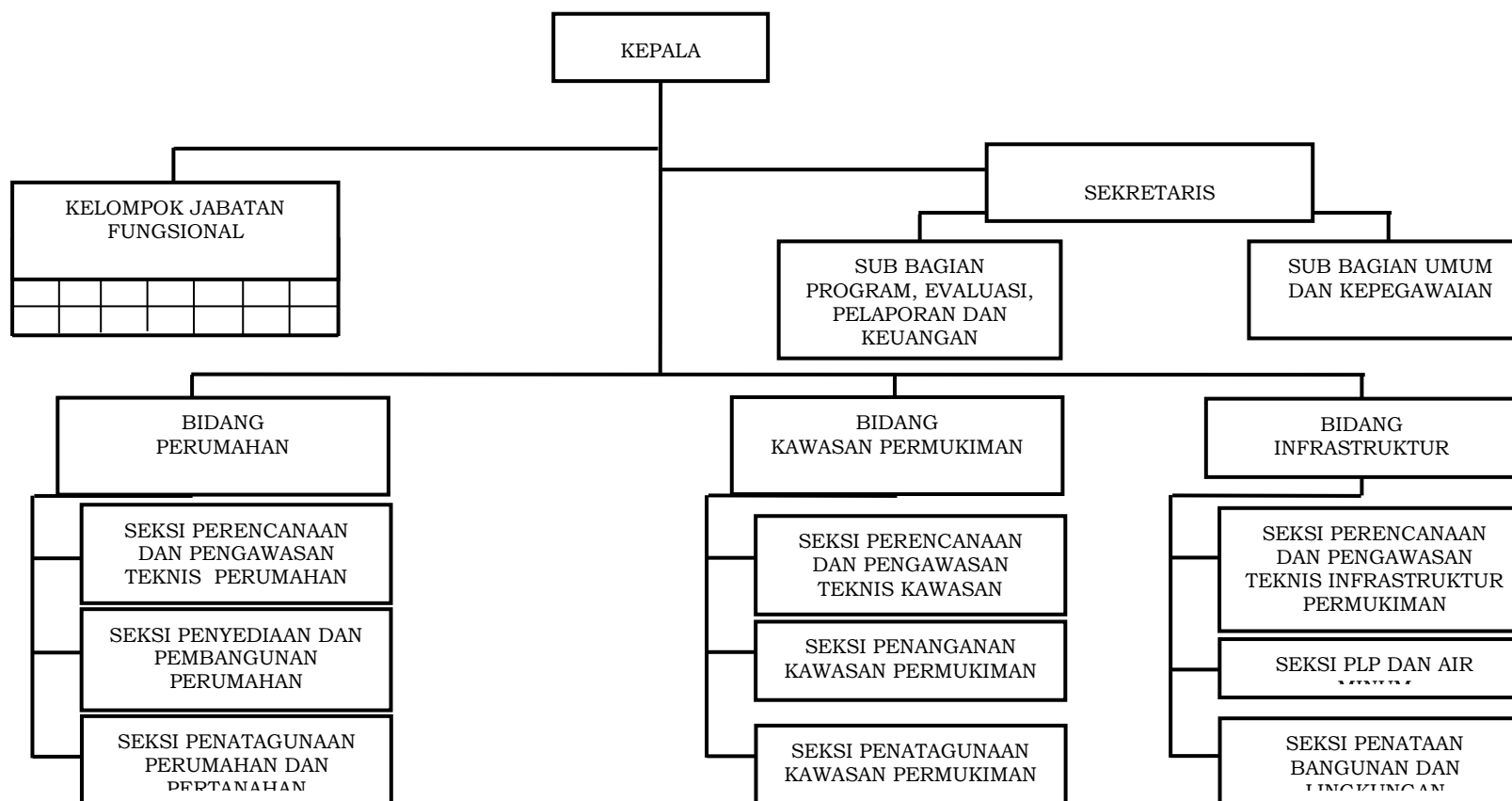
1.7 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan gubernur Provinsi Banten Nomor 83 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Kepala Bidang Perumahan, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
 2. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan;
 3. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
- d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
 2. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman;
 3. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- e. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman;



- 2. Kepala Seksi PLP dan Air Minum;
- 3. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Jabatan Fungsional



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten



1.7.1. Uraian Tugas Dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, uraian tugas dan jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang infrastruktur permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan rencana operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana strategis dinas perumahan dan kawasan permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Merumuskan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan dinas;
- 6) Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
- 7) Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dinas;
- 8) Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;



- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas perumahan dan kawasan permukiman; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan



Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- 6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;



- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- 7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang



berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2 Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelola
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugasSub BagianProgram, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub BagianProgram, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;



- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang bersumber dari APBD maupun APBN;
- 8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPPJ) Gubernur lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;



- 11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Bidang Perumahan

- a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan, Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan, serta Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.



- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perumahan berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perumahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perumahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelidiki pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perumahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan perumahan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - 6) Merencanakan pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial,



rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan perumahan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;

- 7) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 8) Merencanakan penanganan pembebasan lahan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, dan bidang infrastruktur permukiman;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perumahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

3.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan.



b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 6) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
- 7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun, dan rumah khusus;



- 8) Melaksanakan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun, dan rumah khusus;
- 10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan untuk kabupaten/kota;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.2 Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan

- a. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,



pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi penyediaan dan pembangunan perumahan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pemutakhiran data penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 6) Melaksanakan penyiapan fasilitasi bahan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;



- 7) Melaksanakan pembinaan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 9) Melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 10) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.3 Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan

- a. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan



pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan dan kegiatan pada Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
- 6) Melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;



- 7) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 8) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan;
- 9) Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembiayaan perumahan;
- 10) Menyiapkan strategi pembiayaan dan analisis pasar perumahan;
- 11) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pembiayaan perumahan;
- 12) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi kerja sama dan kemitraan;
- 13) Melaksanakan fasilitasi penanganan pelaksanaan pembebasan lahan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan bidang infrastruktur permukiman;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman

- a. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman, Seksi Penanganan Kawasan Permukiman, serta Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;



- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, penyelenggaraan bantuan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Merencanakan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan rumah swadaya dan penanganan kawasan kumuh;
- 7) Merencanakan pembinaan, pengembanga dan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 8) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.



4.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;



- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Menyiapkan bahan fasilitasi pendataan backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;
- 7) Menyiapkan bahan verifikasi data backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;
- 8) Menyiapkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan backlog;
- 9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 10) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
- 11) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;

4.2 Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman

- a. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,



pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi Penanganan Kawasan Permukiman.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Kawasan Permukiman;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyiapkan data penerima bantuan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulant di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;



- 7) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.3 Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman

- a. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :



- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pengendalianpenyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 7) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kawasan permukiman;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi



- hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

- a. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman, Seksi PLP dan Air Minum serta Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat



dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis operasional bidang penyehatan lingkungan dan air minum, penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
- 6) Merencanakan penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan, penyehatan lingkungan dan air minum, penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
- 7) Merencanakan pelaksanaan pengendalian teknis program pengelolaan, pengembangan permukiman, penyehatan lingkungan, air bersih dan penataan bangunan;



- 8) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis programpengembangan permukiman, penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan bangunan;
- 9) Merencanakan pelaksanaan pemetaan pengembangan permukiman, penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan bangunan;
- 10)Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi vertikal;
- 11)Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 12)Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 13)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan



kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan teknisbidang infrastruktur permukiman dan bangunan gedung;
- 6) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
- 7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan teknis dan pengendalian bidang infrastruktur permukiman;



- 8) Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengawasan teknis infrastruktur permukiman dan penataan bangunan gedung;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian infrastruktur permukiman dan penataan bangunan gedung;
- 10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan untuk kabupaten/kota;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5.2 Kepala Seksi PLP dan Air Minum

- a. Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,



koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi PLP dan Air Minum

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi PLP dan Air Minum berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi PLP dan Air Minum;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pemutakhiran data air minum dan penyehatan lingkungan;
- 6) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis kerja sama dan kemitraan dengan swasta, dan lembaga lainnya dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan pada kawasan tertentu, dan kawasan strategis tertentu dan lintas kabupaten/kota ;
- 7) Melaksanakan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;



- 8) Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
- 9) Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana air minum, dan penyehatan lingkungan untuk daerah bencana dan rawan air skala provinsi;
- 10) Melaksanakan supervisi kegiatan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan di kawasan tertentu dan kawasan strategis tertentu lintas kabupaten/kota;
- 11) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5.3 Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

- a. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan



pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pemutakhiran data tata bangunan dan lingkungan;
- 6) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis dan strategi penataan tata bangunan dan lingkungan;
- 7) Melaksanakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangun dan gedung yang dilindungi dan dilestarikan;



- 8) Melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah Negara;
- 9) Menyiapkan bahan model bangunan gedung;
- 10) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat Daerah provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

1.8 Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.



Sampai dengan Desember 2018, jumlah personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 64 Orang. Data pegawai (PNS) di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Org)
Sekolah Dasar (SD)	0
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	5
Diploma III	6
Diploma IV	0
Sarjana Strata -1	24
Sarjana Strata -2	29
JUMLAH	64 Orang

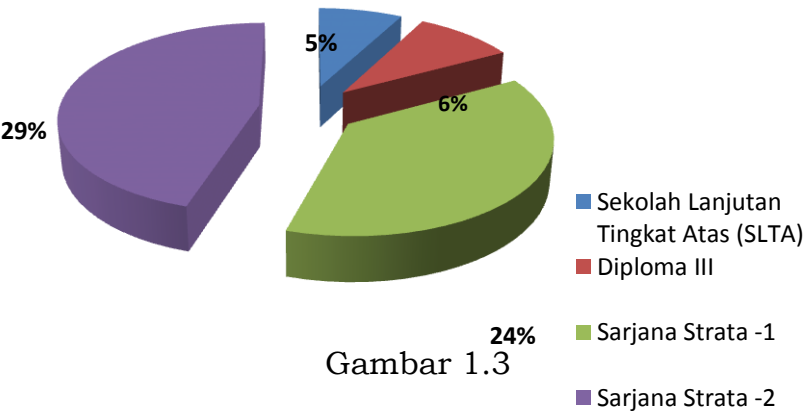


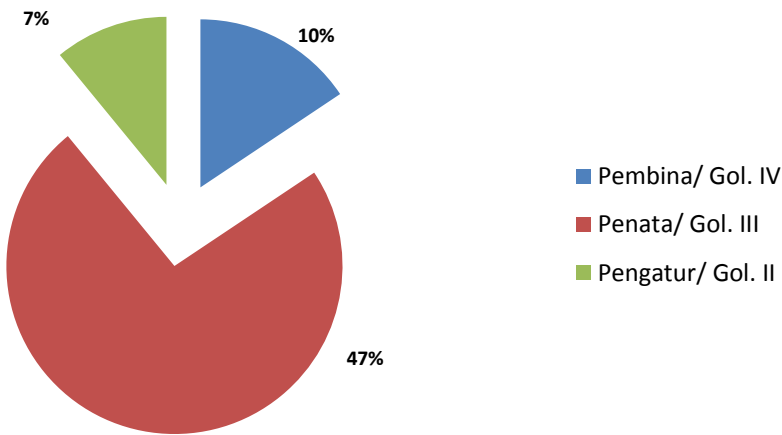
Diagram Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sedangkan, apabila dilihat berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang kepangkatan/Golongan

Pangkat/ Golongan	Jumlah (Org)
Pembina/ Gol. IV	10
Penata/ Gol. III	47
Pengatur/ Gol. II	7
Juru/ Gol. I	0
JUMLAH	64 Orang



Gambar 1.4 Diagram Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Kepangkatan/Golongan

1.9 Sistematika Penulisan

Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata



Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Ini berisikan empat bab Utama yang terdiri dari : (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kineja; (3) Akuntabilitas Kinerja; dan (4) Penutup.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten serta sistematika penulisan;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II ini merupakan penjabaran rencana strategis, visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja untuk Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab III ini merupakan inti dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten, dimana di

dalamnya terdapat penjelasan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan keuangan Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten.

Bab IV Penutup



Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten tahun 2019 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pekerjaan.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.1 Rencana Strategis

Sebuah Rencana Strategis merupakan perencanaan jangka menengah (*mid-term planning*), yang terdiri atas visi, misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh OPD pada tahun ke-3 (dua) mendatang (akhir periode perencanaan). Visi memegang peranan penting dalam menentukan tujuan OPD dimasa yang akan datang.

Dalam periode 2017-2022, Visi Pembangunan Provinsi Banten adalah

**“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan
Iman dan Takwa”**

sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Banten secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Banten lebih sejahtera.

2.1.2 Visi Dan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi pembangunan



Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018.

Visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten masih mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022. Visi tersebut yaitu :

“Terwujudnya Infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang handal dalam mendukung Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah”

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten pada tahun 2018, dimana infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Makna dari infrastruktur permukiman yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang permukiman yang penjabarannya meliputi :



1. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
2. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
3. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
4. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan
5. Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.



Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi Banten yang masih mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2017 – 2022, yaitu :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dan berkualitas dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua.
2. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

2.1.3 Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional

adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal;



2. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan;
3. Meningkatkan infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana
4. Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat;
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara;
6. Meningkatkan kinerja, disiplin dan profesionalitas aparatur daerah;
7. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian;
8. Menata regulasi manajemen kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur;
9. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengembangan pilihan layanan bergerak;
10. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD;
11. Menyediakan dan menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
12. Menyediakan data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju data pembangunan Banten

2.1.4 Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebijakan Umum bidang perumahan, permukiman dan cipta karya sebagai rumusan dari strategi antara lain:

1. Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik
2. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman



3. Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana.
4. Meningkatnya pemberdayaan komunitas permukiman
5. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan hunian vertikal (rusun), pengembangan kasiba/lisiba, penataan kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman.
6. Terkendalinya proses alih status gedung/rumah negara
7. Meningkatnya kinerja aparatur
8. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;
9. Mantapnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas
10. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
11. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD;
12. Tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Banten

Hubungan Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.1 Hubungan Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022

VISI : Terwujudnya Infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan keciptakarya yang handal dalam mendukung Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah
MISI I : Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dan berkualitas dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia



Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menyelenggarakan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis, kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana.	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman;	1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal;	Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik
		2) Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan;	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
		3) Meningkatkan infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana;	Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana.
Menyelenggarakan pembangunan bidang pemukiman untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dan berkualitas guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas lingkungan permukiman	1) Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat;	Meningkatnya pemberdayaan komunitas permukiman
			Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan hunian vertikal (rusun), pengembangan kasiba/lisiba, penataan kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan



prinsip “infrastruktur untuk semua”			perumahan dan permukiman.
	Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan strategis dan kawasan perkotaan;	1) Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara;	Terkendalnya proses alih status gedung/rumah negara
MISI II : Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang sumberdaya air dan pemukiman yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur	1) Meningkatkan kinerja, disiplin dan profesionalitas aparatur daerah;	Meningkatnya kinerja aparatur;
		2) Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian;	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;
		3) Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD;	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD
	Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan data dan informasi publik yang handal.	1) Menyediakan data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju data pembangunan banten	Tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan banten.



2.1.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten periode Tahun 2017-2022 berdasarkan program dan indikator kinerja programnya antara lain sebagai berikut:

- I. Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, indikator kinerja programnya adalah :

a	Luas Kawasan Kumuh yang ditata
7	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh
8	Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman
9	Penatagunaan Kawasan Permukiman
b	Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani
10	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan
11	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan
1	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan
2	Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Perumahan
12	Penatagunaan Pengembangan Perumahan
13	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan

- II. Program Keciptakarya, indikator kinerja programnya adalah :

c	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
1	Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Strategis
2	Pembangunan Infrastruktur SPAM Lintas Daerah (Regional)
3	Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Minum
d	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi



2	Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan
1	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Strategis
2	Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan
e	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional
1	Pembangunan Infrastruktur Persampahan Regional

III. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, indikator kinerja programnya adalah :

f	Penataan Sarana dan Prasarana KP3B
3	1 Penataan Sarana dan Prasarana KP3B
g	Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi
3	Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi
1	Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi
2	Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
h	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi
1	Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi
2	Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
5	Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman
1	Pengawasan Teknis Infrastruktur Ke-Cipta Karya-an
2	Pembinaan Pengawasan Teknis Ke-Ciptakarya-an
6	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Permukiman

IV. Program Tata Kelola Pemerintahan, indikator kinerja programnya adalah :

i	Tata Kelola Pemerintahan
14	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
15	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
17	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor



18	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
19	Peningkatan Kapasitas Aparatur
20	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah
24	Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Perpustakaan
25	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B
26	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan



Indikator Kinerja Program (Outcome)				Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Ket.
					2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir	
					target	target	target	target	target	target	
Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman											
a			Peningkatan Akses Air Minum Layak	lt/dt	14.01	86.43	186.04	968.92	422.00	1,677.41	
1			Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	lt/dt	14.01	86.43	186.04	968.92	422.00	1,677.41	
		1	Pembangunan Infrastrktur SPAM Lintas Daerah	lt/dt	-	38.91	138.52	921.40	421.17	1,520.00	
		2	Pembangunan Infrastrktur SPAM di Kawasan Strategis	lt/dt	14.01	47.52	47.52	47.52	0.83	157.41	
		3	Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Minum	Kab/ Kota	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
b			Peningkatan Akses Sanitasi Layak	Jiwa	60,000.00	76,400.00	78,400.00	453,400.00	1,285,150.00	1,953,350.00	



2			Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	Jiwa	60,000.00	76,400.00	78,400.00	453,400.00	1,285,150.00	1,953,350.00	
	1		Pembangunan Infrastruktur Persampahan Regional	Jiwa	-			375,000.00	1,218,750.00	1,593,750.00	
	2		Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Strategis	Jiwa	60,000.00	76,400.00	78,400.00	78,400.00	66,400.00	359,600.00	
	3		Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan	Kab/ Kota	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
										-	
c			Pengelolaan Gedung dan Infrastruktur Strategis Provinsi	gedung/ kwsan	4 kwsan	3 gedung, 13 kwsan	4 kwsan	2 gedung, 8 kwsan	1 gedung, 11 kwsan	7 gedung, 38 kwsan	
3			Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/kota	gedung/ kwsan	4 kwsan	3 gedung, 13 kwsan	4 kwsan	2 gedung, 8 kwsan	1 gedung, 11 kwsan	7 gedung, 38 kwsan	
	1		Pembangunan Gedung Strategis		-	3.00	-	2.00	1.00	6.00	
	2		Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis	Kwsan	4.00	13.00	4.00	8.00	11.00	40.00	



		3	Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab/kota	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00	
	4		Perencanaan DED Gedung/Kantor/Badan/Dinas dan Infrastruktur Keciptakarya-an Lainnya	Dok	13.00	10.00	8.00	5.00	4.00	40.00	
		1	Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya-an	Dok	13.00	10.00	8.00	5.00	4.00	40.00	
		2	Pembinaan Perencanaan Teknis Ke-Ciptakarya-an	Kab/kota	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00	
	5		Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman	Dok	20.00	27.00	25.00	28.00	32.00	132.00	
		1	Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya-an	Dok	20.00	27.00	25.00	28.00	32.00	132.00	
		2	Pembinaan Pengawasan Teknis Ke-Ciptakarya-an	Kab/kota	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00	
	6		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Permukiman	%	20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
	d		Luas Kawasan Kumuh yang ditata	Ha	58.40	93.01	79.23	73.52	99.60	403.76	



7			Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	58.40	93.01	79.23	73.52	99.60	403.76	
8			Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	Dok	33.00	27.00	26.00	23.00	16.00	125.00	
9			Penatagunaan Kawasan Permukiman	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	
e			Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	Unit	400.00	570.00	640.00	1,200.00	490.00	3,300.00	
10			Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	Unit	400.00	570.00	640.00	1,200.00	490.00	3,300.00	
11			Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Dok	53.00	4.00	12.00	2.00	3.00	74.00	
		1	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Dok	53.00	4.00	12.00	2.00	3.00	74.00	
		2	Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Perumahan	Kab/ kota	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00	
12			Penatagunaan Pengembangan Perumahan	%	20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
					25,000	116,000	60,000	60,000	-	261,000.00	



13		Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	m2							
		Program Tata Kelola Pemerintahan							-	
f		Tata Kelola Pemerintahan								
14		Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
15		Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
16		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
17		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
18		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
19		Peningkatan Kapasitas Aparatur		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
20		Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
24		Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Perpustakaan		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
25		Penyediaan Data dan Informasi		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	



			Pembangunan								
	g		Peningkatan Kualitas KP3B								
	21		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
	22		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
	23		Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	



Tabel 5.1

Indikasi Rencana Target Capaian Program Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
Tahun 2017-2022

Pencapaian Target Kinerja sangat tergantung pada kebijakan, arahan program strategis dan konsistensi alokasi pendanaan setiap tahunnya sebagai berikut:

Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi akhir	
						Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.	
	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman																
	a		Peningkatan Akses Air Minum Layak		lt/dt	33,550,000,000	241,550,000,000	143,550,000,000	182,550,000,000	103,650,000,000	704,850,000,000						
	1			Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	lt/dt	33,550,000,000	241,550,000,000	143,550,000,000	182,550,000,000	103,650,000,000	704,850,000,000						



Indikator Kinerja Program (Outcome)				Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
		1	Pembangunan Infrastruktur SPAM Lintas Daerah	lt/dt	-	187,000,000,000	89,000,000,000	128,000,000,000	85,000,000,000	489,000,000,000
		2	Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Strategis	lt/dt	32,900,000,000	53,900,000,000	53,900,000,000	53,900,000,000	18,000,000,000	212,600,000,000
		3	Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Minum	Kab/ Kota	650,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000	3,250,000,000
										-
	b		Peningkatan Akses Sanitasi Layak	jiwa	28,100,000,000	76,300,000,000	73,300,000,000	58,300,000,000	96,300,000,000	332,300,000,000



Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	2			Penyelenggaraa n Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	jiwa	28,100,000,000	76,300,000,000	73,300,000,000	58,300,000,000	96,300,000,000	332,300,000,000
		1		Pembangunan Infrastruktur Persampahan Regional	Jiwa	-	40,000,000,000	35,000,000,000	20,000,000,000	65,000,000,000	160,000,000,000
		2		Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Strategis	Jiwa	27,500,000,000	35,700,000,000	37,700,000,000	37,700,000,000	30,700,000,000	169,300,000,000
		3		Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan	Kab/ Kota	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	3,000,000,000
											-



Indikator Kinerja Program (Outcome)				Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	c		Pengelolaan Gedung dan Infrastruktur Strategis Provinsi	gedung/ kwsan	197,350,000,000	615,818,000,000	360,018,000,000	532,418,000,000	265,638,000,000	1,971,242,000,000
	3		Penyelenggaraa n Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/kota	gedung/ kwsan	179,465,000,000	580,065,000,000	333,065,000,000	503,065,000,000	245,065,000,000	1,840,725,000,000
		1	Pembangunan Gedung Strategis		60,000,000,000	345,000,000,000	250,000,000,000	400,000,000,000	150,000,000,000	1,205,000,000,000
		2	Penataan Bangunan dan Lingkungan di	Kwsan	116,000,000,000	232,000,000,000	80,000,000,000	100,000,000,000	92,000,000,000	620,000,000,000



Indikator Kinerja Program (Outcome)				Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
			Kawasan Strategis							
	3		Pengaturan, Pembinaan Penyelenggara n Bangunan Gedung	Kab/ kota	3,465,000,000	3,065,000,000	3,065,000,000	3,065,000,000	3,065,000,000	15,725,000,000
	4		Perencanaan DED Gedung/Kantor /Badan/ Dinas dan Infrastruktur Keciptakaryaa n Lainnya	Dok	8,025,000,000	5,275,000,000	5,975,000,000	3,925,000,000	3,175,000,000	26,375,000,000
	1		Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya-	Dok	7,350,000,000	5,100,000,000	5,800,000,000	3,750,000,000	3,000,000,000	25,000,000,000



Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
				an							
		2		Pembinaan Perencanaan Teknis Ke- Ciptakarya-an	Kab/ kota	675,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	1,375,000,000
	5			Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman	Dok	9,515,000,000	30,283,000,000	20,633,000,000	25,233,000,000	17,053,000,000	102,717,000,000
		1		Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya- an	Dok	9,490,000,000	30,058,000,000	20,408,000,000	25,208,000,000	17,028,000,000	102,192,000,000
		2		Pembinaan Pengawasan Teknis Ke- Ciptakarya-an	Kab/ kota	25,000,000	225,000,000	225,000,000	25,000,000	25,000,000	525,000,000



Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	6			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Permukiman	%	345,000,000	195,000,000	345,000,000	195,000,000	345,000,000	1,425,000,000
	d			Luas Kawasan Kumuh yang ditata	Ha	72,750,000,000	103,930,337,500	89,346,250,000	82,530,075,000	105,703,417,500	454,260,080,000
	7			Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	58,400,000,000	93,010,000,000	79,230,000,000	73,520,000,000	99,600,000,000	403,760,000,000
	8			Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan	Dok	9,250,000,000	7,320,337,500	7,166,250,000	6,060,075,000	3,403,417,500	33,200,080,000



Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
				permukiman							
	9			Penatagunaan Kawasan Permukiman	%	5,100,000,000	3,600,000,0,000	2,950,000,000	2,950,000,000	2,700,000,000	17,300,000,000
	e			Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	Unit	59,570,000,000	155,160,000,000	126,140,000,000	184,120,000,000	37,720,000,000	562,710,000,000
	1 0			Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	Unit	20,200,000,000	31,000,000,000	57,000,000,000	120,000,000,000	33,500,000,000	261,700,000,000
	1 1			Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Dok	7,800,000,000	2,690,000,000	6,970,000,000	2,150,000,000	2,350,000,000	21,960,000,000



Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
		1		Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Dok	4,850,000,000	1,540,000,000	5,820,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000	14,410,000,000
		2		Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Perumahan	Kab/kota	2,950,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	7,550,000,000
	1			Penatagunaan Pengembangan Perumahan	%	5,420,000,000	3,820,000,000	2,170,000,000	1,970,000,000	1,870,000,000	15,250,000,000
	2										
	1			Penyelenggara an Pengadaan Lahan	m2	26,150,000,000	117,650,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000	-	263,800,000,000
	3										
											-
	Program Tata Kelola Pemerintahan										-



Indikator Kinerja Program (Outcome)				Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	f		Tata Kelola Pemerintahan		20,318,224,582	15,691,650,405	17,040,678,886	18,515,712,432	19,988,347,311	86,670,533,616
	1		Penyusunan	%						
	4		Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		182,589,000	200,847,900	220,932,690	243,025,959	267,328,555	1,114,724,104
	1		Perencanaan,	%						
	5		Evaluasi dan Pelaporan		1,775,926,262	1,784,805,893	1,793,729,923	1,802,698,572	1,811,712,065	8,968,872,716
	1		Pengadaan	%						
	6		Sarana dan Prasarana Kantor		7,131,712,400	1,355,200,000	1,440,140,000	1,525,524,000	1,470,396,400	12,922,972,800
	1		Pemeliharaan	%						
	7		Sarana dan Prasarana Kantor		1,650,000,000	1,815,000,000	1,996,500,000	2,196,150,000	2,415,765,000	10,073,415,000
	1		Penyediaan	%						
	8		Barang dan		5,665,000,000	6,231,500,000	6,854,650,000	7,540,115,000	8,294,126,500	34,585,391,500



Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
				Jasa Perkantoran							
	1 9			Peningkatan Kapasitas Aparatur	%	362,996,920	399,296,612	439,226,273	483,148,901	531,463,791	2,216,132,496
	2 0			Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	%	2,750,000,000	3,025,000,000	3,327,500,000	3,660,250,000	4,026,275,000	16,789,025,000
	2 4			Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Perpustakaan	%	250,000,000	275,000,000	302,500,000	332,750,000	366,025,000	1,526,275,000
	2 5			Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	%	550,000,000	605,000,000	665,500,000	732,050,000	805,255,000	3,357,805,000
											-



Indikator Kinerja Program (Outcome)				Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	g		Peningkatan Kualitas KP3B		27,350,500,000	28,390,500,000	15,790,000,000	16,526,975,000	17,300,798,750	105,358,773,750
	2 1		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B	%	18,100,000,000	19,805,000,000	8,727,750,000	9,164,137,500	9,622,344,375	65,419,231,875
	2 2		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B	%	1,050,500,000	1,050,500,000	1,050,500,000	1,050,500,000	1,050,500,000	5,252,500,000
	2 3		Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B	%	8,200,000,000	7,535,000,000	6,011,750,000	6,312,337,500	6,627,954,375	34,687,041,875



Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
											-
				TOTAL		438,988,724,582	1,236,840,487,905	825,184,928,886	1,074,960,762,432	646,300,563,561	4,222,275,467,366



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dan masing – masing indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017 – 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2014 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	= 100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



3.1 Evaluasi Kinerja

Sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkewajiban untuk mencapai target- target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian – capaian kinerja tersebut. Dibawah ini diuraikan hasil capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Selain capaian kinerja dari penetapan kinerja, dalam bab ini juga diuraikan capaian kinerja anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menetapkan lima rencana startegis yang tercantum dalam dokumen Perencanaan Kinerja. Keempat rencana strategis tersebut meliputi :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan
2. Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan
3. Program Keciptakarya
4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Ketercapaian kinerja rencana startegis tersebut di atas dapat dilihat dari keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian beberapa indikator kinerja yang akan dicapainya. Pengukuran kinerja per indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :



Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Eselon II TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Uraian Faktor Pencapaian/ Ketidaktercapaian / Pelampauan Capaian
1 Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang layak Tahun 2019	Persentase Rumah Layak Huni (satuan : %)	85.18	93.13	109.33%	Telah melampaui target, data berdasarkan capaian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Maret Tahun 2019
2	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (satuan : Ha)	203.20	200.87	98.85%	Telah mencapai target, merupakan hasil kolaborasi antara penanganan Dinas Perkim Prov. Banten dengan Kab/Kot and KOTAKU
3 Tercapainya sarana dan prasarana gedung strategis provinsi yang berkualitas	Persentase gedung Strategis Provinsi dalam kondisi baik (Satuan = %)	50.00	39.89	79.78%	Belum mencapai target, pekerjaan pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre (Multiyears) belum dilaksanakan pada TA. 2019.
4 Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (satuan = Nilai (75))	75.00	67.13	89.50%	Belum tercapai, Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan pemeliharaan lapangan (Mobil Pengangkut Material (Hio 300 Dutro 130 HD 6,8 PS bak Drop Side Platform + Crane Kap 3 Ton)) dan belanja modal peralatan mesin-pengadaan kendaraan bermotor khusus (Mobil Toilet (Long Chasis - Super VVIP)) tidak diserap, dikarenakan gagal lelang. Dan Belanja Pengiriman Kursus-kursus Pelatihan Singkat/Pelatihan pada Aparatur Dinas hanya terlaksana 50%, hal tersebut dikarenakan adanya kursus-kursus pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Banten.
5 Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang Layak Tahun 2019 (Persampahan)	Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah (satuan : %)	20.00	0.00	0.00%	Tidak tercapai, dikarenakan pekerjaan tidak dilaksanakan yang disebabkan oleh penolakan untuk pembangunan TPST dari masyarakat.



Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Esselon III TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

No	Program /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Uraian Faktor Pencapaian/ Ketidaktercapaian / Pelampauan Capain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	3.00	2.69	89.50%	Belum tercapai, Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan pemeliharaan lapangan (Mobil Pengangkut Material (Hio 300 Dutro 130 HD 6,8 PS bak Drop Side Platform + Crane Kap 3 Ton)) dan belanja modal peralatan mesin-pengadaan kendaraan bermotor khusus (Mobil Toilet (Long Chasis - Super VVIP)) tidak diserap, dikarenakan gagal lelang. Dan Belanja Pengiriman Kursus-kursus Pelatihan Singkat/Pelatihan pada Aparatur Dinas hanya terlaksana 50%, hal tersebut dikarenakan adanya kursus-kursus pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Banten.
2	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	203.20	200.87	98.85%	Telah mencapai target, merupakan hasil kolaborasi antara penanganan Dinas Perkim Prov. Banten dengan Kab/Kot and KOTAKU
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	85.18	93.13	109.33%	Melampaui target, data berdasarkan capaian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Maret Tahun 2019
3	Program Keciaptakaryaan	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)	76.15	73.68	96.76%	Tercapai, data berdasarkan capaian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun 2019
	Program Keciaptakaryaan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)	75.57	79.71	105.48%	Melampaui target, data berdasarkan capaian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun 2019
	Program Keciaptakaryaan	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	20.00	0.00	-	Tidak tercapai, dikarenakan pekerjaan tidak dilaksanakan yang disebabkan oleh penolakan untuk pembangunan TPST dari masyarakat.
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	50.00	39.89	79.78%	Belum mencapai target, pekerjaan pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre (Multiyears) belum dilaksanakan pada TA. 2019.



	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	69.00	62.56	90.67%	Belum mencapai target, terbangun 5 gedung strategis Provinsi. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan pada pekerjaan minor. Pekerjaan Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar (90 %), penataan tugu batas provinsi (20%), Pekerjaan peningkatan rumah korem (10%), terlambat dalam proses lelang.
--	---	--	-------	-------	--------	---

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Esselon IV TA. 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

No.	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Uraian Faktor Pencapaian/ Ketidaktercapaian / Pelampauan Capain
1		2	3	4	5	6
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Penyusunan Laporan Keuangan (satuan : dokumen)	17.00	17.00	100.00%	
2		Penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) (satuan : dokumen)	2.00	2.00	100.00%	
3		Penyusunan Dokumen Laporan Pajak (satuan : dokumen)	3.00	3.00	100.00%	
4	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan (satuan : Laporan)	9.00	9.00	100.00%	
5		Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan (satuan : Laporan)	3.00	3.00	100.00%	
6		Laporan Evaluasi dan Pengendalian (satuan : Laporan)	5.00	5.00	100.00%	
7		Revisi RENSTRA OPD (satuan : dokumen)	1.00	1.00	100.00%	
8	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Tersusunnya Visualisasi Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 (satuan : Dokumen Visual)	3.00	3.00	100.00%	
9		Tersusunnya Bahan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik Tahun 2019 (Satuan : Dokumen)	2.00	2.00	100.00%	
10		Terkelolannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Media Informasi Tahun 2019 (Satuan : Dokumen)	1.00	1.00	100.00%	
11		Tersusunnya Profil Kinerja Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 (Satuan : Dokumen)	2.00	2.00	100.00%	
12	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
13		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
15		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	



16		Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
17	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Operasional Kantor tidak Tetap (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
18		Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing) (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
19		Penyediaan Barang Pake Habis (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
20		Penyediaan Bahan Cetak (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
21		Penyediaan Makan dan Minum Kantor (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
22		Penyediaan Operasional Jasa Kantor (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
23		Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
24		Penyediaan BBM (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
25	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Fasilitasi Administarsi Kepegawaian (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
26		Peningkatan Kompetensi Aparatur (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
27	Koordinasi dan Konsultansi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
28		Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
29	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
30		Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
31	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
32	Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi (Satuan : Gedung)	7.00	5.00	71.43%	Tidak tercapai target, pekerjaan pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre (Multiyears) belum dilaksanakan pada TA. 2019.
33		Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Satuan : Kab/Kota)	8.00	8.00	100.00%	
34	Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Startegis Provinsi	Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Startegis Provinsi (Satuan : Kawasan)	3.00	3.00	100.00%	
35		Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Startegis Provinsi	8.00	8.00	100.00%	
36	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman KumuhKel.Cempaka Putih Kec.Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan (satuan : Ha)	14.90	14.90	100.00%	
37		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Warung Jaud Kec.Kasemnen Kota Serang (satuan : Ha)	14.04	14.04	100.00%	
38		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kel Juhut Kec. Karangtanjung Kab.Pandeglang (satuan : Ha)	14.00	14.00	100.00%	



39		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kawasan Strategis dan Lintas Batas Provinsi Banten (satuan : Kegiatan)	135.00	135.00	100.00%	
40	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	Terlaksananya Perencanaan Teknis Bidang Kawasan Permukiman (satuan : dokumen)	13.00	23.00	176.92%	
41		Terlaksananya Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman (satuan : dokumen)	12.00	27.00	225.00%	
42	Penatagunaan Kawasan Permukiman	Penatagunaan Kawasan Permukiman (Satuan : %) - Pedoman Penilaian Kinerja Kumuh dan Pedoman Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat (2 Dokumen) - Penataan Lingkungan Permukiman Banten Lama dan sekitarnya (7.200 m)	20.00	20.00	100.00%	
43	Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung KP3B (satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
44	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 5 Kab/Kota (Satuan : rumah)	100.00	184.00	184.00%	
45		Peningkatan Kualitas PSU Masjid (satuan : Paket)	4.00	4.00	100.00%	
46		Sosialisasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 5 Kab/Kota (Satuan : keg)	5.00	5.00	100.00%	
47		Peningkatan Kualitas PSU Jalan (satuan : Paket)	103.00	146.00	141.75%	
48		Pengadaan Komponen Rumah (satuan : Paket)	1.00	1.00	100.00%	
49	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Perencanaan Teknis Perumahan (Satuan : Dok dan Laporan)	20.00	13.00	65.00%	Tidak tercapai karena anggaran digunakan untuk kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pembangunannya pada tahun berjalan
50		Pengawasan Teknis Perumahan (Satuan : Dok dan Laporan)	17.00	114.00	670.59%	
51	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penatagunaan Pengembangan Perumahan (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	
52	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	Terlaksananya Pengadaan Lahan Relokasi Adanya Program Pembangunan Provinsi (satuan : M2)	29,000.00	45,400.00	156.55%	
53		Terlaksananya Pengadaan Lahan Pembangunan Perumahan (Satuan : M2)	20,000.00	126,600.00	633.00%	
54		Tersusunnya Perencanaan Pengadaan Lahan (Satuan : Dokumen)	1.00	1.00	100.00%	
55	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur SPAM di kawasan Strategis Kab. Lebak (satuan : lt/dt)	0.25	0.25	100.00%	
56		Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur SPAM di kawasan Strategis Kab. Pandeglang (satuan : lt/dt)	0.07	0.07	100.00%	
57		Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur SPAM di kawasan Strategis Kab. Serang (satuan : lt/dt)	0.12	0.12	100.00%	



58		Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur SPAM di kawasan Strategis Kab. Tangerang (satuan : lt/dt)	0.07	0.07	100.00%	
59		Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur SPAM di kawasan Strategis Kota Serang (satuan : lt/dt)	0.08	0.08	100.00%	
60		Terlaksananya Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Minum (Satuan : kab/kota)	5.00	5.00	100.00%	
61		Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur SPAM Sindang Heula (satuan : lt/dt)	43.30	40.07	92.54%	Pekerjaan Pembangunan WTP Sindang Heula + Reservoir Pipa Distribusi yang belum selesai pekerjaan Adanya keterlambatan pengiriman alat penunjang WTP, sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan finishing pada WTP, reservoir dan pembuatan jalan beton
62	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di kawasan Strategis Kab. Lebak (Satuan : KK)	800.00	800.00	100.00%	
63		Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di kawasan Strategis Kab. Serang (Satuan : KK)	1,000.00	1,000.00	100.00%	
64		Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di kawasan Strategis Kab. Tangerang (Satuan : KK)	500.00	500.00	100.00%	
65		Terlaksananya Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Sanitasi (Satuan : kab/kota)	8.00	8.00	100.00%	
66	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Persampahan Regional (Satuan : Jiwa)	71,330.00	71330.00	100.00%	
67	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakarya-an	Pembebasan Lahan Pembangunan Off Take Reservoir Jaringan Transmisi dan Distribusi WTP Sindangheula (Satuan : M2)	800.00	800.00	100.00%	
68		Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B (Satuan : M2)	13,500.00	19,500.00	144.44%	
69		Pengadaan Lahan Jalan Akses TPST Bojong Menteng (Satuan : Ha)	3,000.00	0.00	0.00%	Tidak tercapai, dikarenakan pekerjaan tidak dilaksanakan yang disebabkan oleh penolakan untuk pembangunan TPST Bojong Menteng dari masyarakat.
70	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	Perencanaan Teknis Infrastruktur Ke-Ciptakarya-an (Satuan : Dokumen)	29.00	29.00	100.00%	
71		Pembinaan Teknis Infrastruktur Ke-Ciptakarya-an (Satuan : Kab/Kota)	8.00	8.00	100.00%	
72		Pengawasan Teknis Infrastruktur Ke-Ciptakarya-an (Satuan : Dokumen)	46.00	46.00	100.00%	
73		Pembinaan Pengawasan Teknis Infrastruktur Ke-Ciptakarya-an (Satuan : kab/kota)	8.00	8.00	100.00%	
74		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Permukiman (Satuan : %)	20.00	20.00	100.00%	



Tabel 3.3 Perbandingan Pengukuran Kinerja TA. 2019, TA. 2018 dan TA. 2017 Pada
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%	100%	100%	2.80	2.69	95.96%	3.00	2.69	89.50%
		Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	100%						
2	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100 %	22.55%	22.55%						
		Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100%	100%	100.00%						
		Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian	100 %	77.41 %	77.41%						



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	100%	100%	100.00%						
3	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (M3)	1.983,7 5 m3	734,4 m3	37,2 %						
		Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel (lokasi)	113	71	62,83 %						
		Penyelesaian Gedung KP3B	1	1	100 %						
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3	3	100 %						
4	Pembinaan dan Penataan Perumahan	Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan	20%	6.40%	32%						



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)				114.60	58.22	50.80%	203.20	200.87	98.85%
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)				84.02	309.50	368.36%	85.18	93.13	109.33%
7	Program Keciaptakaryaan	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)				72.75	74.90	102.96%	76.15	73.68	96.76%
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)				72.86	71.09	97.57%	75.57	79.71	105.48%
		Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)				0.00	0.00	-	20.00	0.00	-



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)				25.00	140.66	562.66%	50.00	39.89	79.78%
		persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)				28.00	99.21	354.31%	69.00	62.56	90.67%



3.2 Analisa Pencapaian Kinerja

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten memiliki 4 (empat) program/sasaran startegis yang akan dicapai melalui 12 (dua belas) indikator kinerja yang harus dilaksanakan. Terhadap 4 (empat) program/sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.4 Pencapaian Program/Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Sasaran Startegis	Capaian Indikator	Target Fisik	Pagu Anggaran (Rp)	Raelisasi Anggaran (Rp)	
					(Rp)	(%)
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	1	83.72%	40.333.236.000,00	34.567.825.503,00	85.71
2	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	2	90.21%	144.395.822.086,00	130.672.693.207,00	90.50
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	48.59%	260.449.601.144,00	168.238.254.978,00	64.60
4	Program Keciptakarya	3	65.36%	119.433.751.770,00	89.097.163.312,00	74.60

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari keempat sasaran strategis tersebut terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama yaitu Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan, Program Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Program Keciptakarya dimana rincian dan analisis terhadap capaian sasaran strategis tersebut beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :



1. Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan

Pencapaian Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan dapat dilihat dalam tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.7 Pencapaian Indikator Kinerja Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Pemukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
1	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	1 Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	203.20	Ha	200.87	Ha	98.85	%
		2 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	85.18	%	93.13	98.85%	109.33	%
		Rata – Rata Capaian Indikator Kinerja						114.88 %

Pagu Anggaran TA. 2019 untuk program ini adalah sebesar Rp. 144.395.822.086,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2019 adalah sebesar Rp. 130.672.693.207,84 (*Seratus tiga Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam ratus Sembilan Puluh Tiga Dua ratus Tujuh Rupiah*), terserap 90.50% dari pagu anggaran.

Dari tabel 3.3 diatas terlihat ada 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Adapun evaluasi dan analisis capaian setiap indikator kinerja tersebut diuraikan dibawah ini :

1. Indikator Kinerja Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha) Pencapaian indikator kinerja Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha) ini tidak memenuhi target yang di tetapkan dimana target yang harus dicapai adalah sebesar 203.20 Ha hanya terealisasi sebesar 200.87 Ha, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.8 Pencapaian Indikator Kinerja Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	1 Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	203.20	Ha 200.87	Ha 98.85 %

Capaian Indikator Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani sampai dengan tahun anggaran 2019 telah melampaui target dengan capaian sebesar 98.85%. Pencapaian indikator Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten bersama Dinas terkait Kabupaten/Kota dan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Provinsi Banten.

Permasalahan :

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti dan menghambat pelaksanaan kegiatan. Hal ini terlihat dari capaian indikator sebesar 98.85%.



Solusi :

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dapat dijabarkan solusinya sebagai berikut :

1. Melakukan validasi dan verifikasi data kawasan kumuh sebelum dimasukkan dalam peraturan walikota/Bupati yang dilaksanakan bersama-sama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Prioritas penanganan dengan tingkat kekumuhan yaitu kumuh berat yang terlebih dahulu ditangani
3. Penanganan kawasan kumuh dilakukan setelah disusunnya perencanaan teknis (DED)

Pagu Anggaran TA. 2019 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar Rp. 48.642.623.250,00 (*Empat Puluh Delapan Milyar Enam ratus Empat Puluh Dua Juta Enam ratus Duan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2019 nya adalah sebesar Rp. 46.976.345.187,94 (*Empat Puluh Enam Milyar Sembilan ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Pulh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), terserap 96.57% dari pagu anggaran.

Adapun Indikator kinerja Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha) ini tidak tercapai dikarenakan efesiensi belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja pakaian kerja lapangan, belanja uang saku dan sisa kontrak belanja jasa konsultansi perencanaan, belanja jasa konsultansi pengawasan.

Pada Indikator Kinerja Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha) ini terdapat 3 Kegiatan dan 7 tolok ukur diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh, meliputi Sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kel.Cempaka Putih Kec.Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan



1. Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
 2. Penyediaan Air Minum Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
 3. Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
 4. Pembangunan Ruang Terbuka Publik Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
 5. Konsultan Individual Pendamping Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Tangerang Selatan
 6. Dokumentasi Hasil Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Tangerang Selatan
 7. Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Tangerang Selatan
- 2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang
1. Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang
 2. Penyediaan Air Minum Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang
 3. Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang
 4. Pengelolaan Air Limbah Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang
 5. Pengelolaan Persampahan Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang
 6. Pembangunan Ruang Terbuka Publik Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang
 7. Konsultan Individual Pendamping Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Serang



8. Dokumentasi Hasil Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Serang
9. Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Serang
- 3) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kel Juhut Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang
 1. Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kel. Juhut Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang
 2. Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan Kel. Juhut Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang
 3. Pengelolaan Air Limbah Kel. Juhut Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang
 4. Pengelolaan Persampahan Kel. Juhut Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang
 5. Pembangunan Ruang Terbuka Publik Kel. Juhut Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang
 6. Konsultan Individual Pendamping Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Pandeglang
 7. Dokumentasi Hasil Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Pandeglang
 8. Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Pandeglang
- 4) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kawasan Strategis dan Lintas Batas Provinsi Banten
 1. Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan di Kabupaten Lebak
 - Kp. Roke Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak
 - Kp. Lebu Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak
 - Kp. Kadu Lisung Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak
 - Kp. Cibuah Lebak Kec. Warunggunung Kab. Lebak
 - Kp. Selaraja Barat Desa Selaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak
 - Kp. Selaraja Barat Desa Selaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak



- Kp. Batu Bolong Desa Selaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak
 - Kp. Selaraja Tengah Desa Selaraja Kec. Warunggunung Kab. Lebak
 - Kp. Babakan Desa Sindangwangi Kec. Muncang kab. Lebak
 - Kp. Babakan Desa Sindangwangi Kec. Muncang kab. Lebak
 - Kp. Pasir Ranji Desa Sukasari Kec. Malingping Kab. Lebak
 - Desa Karya Jaya Kec. Cimarga Kec. Lebak
 - Desa Cisimeut Raya Kec. Leuwidamar Kab. Lebak
 - Desa Sangiang Tanjung Kec. Kalanganyar Kab. Lebak
 - Desa Pasir Kupa Kec. Kalanganyar Kab. Lebak
 - Desa Muara Kec. Wanasalam Kab. Lebak
 - Desa Sukatani Kec. Wanasalam Kab. Lebak
 - Desa Nayagati Kec. Leuwidamar Kab. Lebak
 - Desa Lebaktipar Kec. Ciligrang Kab. Lebak
 - Desa Gunung Batu Kec. Ciligrang Kab. Lebak
2. Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kab. Pandeglang
- Kp. Mauk Kel. Juhut Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang
 - Kp. Kadu Sekul Desa Sukamanah Kec. Jiput Kab. Pandeglang
 - Kp. Kadu Tolok Desa Sukamanah Kec. Jiput Kab. Pandeglang
 - Kp. Cigarunggung Desa Ciherang Kec. Picung Kab. Pandeglang
 - Kp. Sungkelang Desa Bungur Copong Kec. Picung Kab. Pandeglang
 - Kp. Sidamukti Desa Sindangresmi Kec. Sindangresmi Kab. Pandeglang
 - Desa Nanggala Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang
 - Desa Sukamulya Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang
 - Desa Cikiruh Wetan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang
 - Desa Cikeusik Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang
 - Kp. Sobong Desa Cikadueun Kec. Cipeucang Kab. Pandeglang
 - Kp. Cikaduen Desa Cikadueun Kec. Cipeucang Kab. Pandeglang



- Pondok Pesantren Turus kel. Kabayan Kec. Pandeglang kab. Pandeglang
 - Desa Rancateureup Kec. Labuan Kab. Pandeglang
 - Desa Banyu Biru Kec. Labuan Kab. Pandeglang
 - Desa Pangkalan Kec. Sobang Kab. Pandeglang
 - Desa Cikayas Kec. Angsana Kab. Pandeglang
 - Desa Kadu Badak Jaya Kec. Angsana Kab. Pandeglang
 - Desa Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang
 - Desa Mekarjaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang
 - Desa Giripawana Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang
3. Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kota Serang
- Kp. Pakel Masjid Kel. Gelam Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
 - Kel. Sukalaksana Kec. Curug Kota Serang
4. Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kab. Serang
- Desa Bandulu Kec. Anyar Kab. Serang
 - Desa Bunihara Kec. Anyar Kab. Serang
 - Desa Cikoneng Kec. Anyar Kab. Serang
 - Desa Sindang Mandi Kec. Anyar Kab. Serang
 - Desa Sindang Karya Kec. Anyar Kab. Serang
 - Desa Tanjung Manis Kec. Anyar Kab. Serang
 - Desa Mekar Sari Kec. Anyar Kab. Serang
 - Desa Kramatlaban Kec. Padarincang Kab. Serang
 - Desa Kalumpang Kec. Padarincang Kab. Serang
 - Desa Barugbug Kec. Padarincang Kab. Serang
 - Desa Bantar Waru Kec. Cinangka Kab. Serang
 - Desa Baros Jaya Kec. Cinangka Kab. Serang
 - Desa Ranca Sanggal Kec. Cinangka Kab. Serang
 - Kp. Kolelet Desa Barugbug Kec. Padarincang Kab. Serang
 - Jl. Kubang Desa Sukarena Kec. Ciomas Kab. Serang
 - Desa Sukabares Kec. Ciomas Kab. Serang
 - Desa Ujung Tebu Kec. Ciomas Kab. Serang



- Desa Kadubeureum Kec. Pabuaran Kab. Serang
- Desa Telaga Warna Kec. Pabuaran Kab. Serang
- Desa Ciwarna Kec. Mancak Kab. Serang
- Desa Angsana Kec. Mancak Kab. Serang
- Desa Pasir Waru Kec. Mancak Kab. Serang
- Desa Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang
- Desa Dahu Kec. Cikeusal Kab. Serang
- Kp. Cijampang Desa Bojot Kec. Jawilan Kab. Serang
- Kp. Terahan Desa Sukasari kec. Tunjungteja Kab. Serang
- Desa Cisalam Kec. Baros Kab. Serang

Dari kegiatan tersebut diatas telah mencapai progress fisik sebesar 100%.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh ini dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini :



	
Pembangunan Ruang Terbuka Publik Kel. Juhut Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang	
	
Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan Kel. Juhut Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang	
	
JALAN PAVING BLOK DESA SANINTEN – KEC. KADUHEJO - PANDEGLANG	
	
Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kel. Juhut Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang	



	
Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan	
	
Penyediaan Air Minum Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan	
	
Pembangunan Ruang Terbuka Publik Kel.Cempaka Putih Kec.Ciputat Timur Kota Tangsel	
	
Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan	



	
Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang	
	
Peningkatan Kualitas Drainase Lingkungan Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang	
	
Kp. Kadulalay Desa Kertaraharja Kec.Banjarsari Kab.Lebak	
	
Desa Umbultanjung Kec.Cinangka Kab.Serang	



	
Pembangunan Ruang Terbuka Publik Kampung KB Waru Desa Pangkat Kec. Jayanti Kab. Tangerang	
	
Penyediaan Sarana Air Bersih Kampung KB Waru Kejaroran 1 Rt. 01 Desa Pangkat Kec. Jayanti Kab. Tangerang	
	
	
Penyediaan Sarana Air Bersih Kampung KB Waru Kejaroran 4 Rt. 01 Desa Pangkat Kec. Jayanti Kab. Tangerang	



	
Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kab. Lebak di Desa Sindangwangi Kec. Muncang Kab. Lebak	
	
Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kab. Serang di Desa Angsana Kec. Mancak Kab. Serang	
	
Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kota Serang di Kel. Cipocok Jaya Kec. Cipocok Jaya Kota Serang	
	
Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Kab. Tangerang di Jalan Menuju Yayasan Nurul Hidayah Desa Kronjo Kec. Kronjo Kab. Tangerang	



Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 41.842.774.000,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*). Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100,00 % dan *realisasi keuangan* sebesar Rp. 41.029.691.167,94 (97,77%). Sisa anggaran sebesar Rp.813.082.832,06 (8,94%) merupakan efisiensi belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja pakaian kerja lapangan, belanja uang saku, dan sisa kontrak belanja jasa konsultansi perencanaan, belanja jasa konsultansi pengawasan.

b. Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman, meliputi sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Teknis Bidang Kawasan Permukiman kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 18 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Kawasan Strategis dan Kawasan Lintas Batas Provinsi Banten 1
 2. Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Kawasan Strategis dan Kawasan Lintas Batas Provinsi Banten 2
 3. Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Kawasan Strategis dan Kawasan Lintas Batas Provinsi Banten 3
 4. Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Kawasan Strategis dan Kawasan Lintas Batas Provinsi Banten 4
 5. Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Kawasan Strategis dan Kawasan Lintas Batas Provinsi Banten 5
 6. Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Kawasan Strategis dan Kawasan Lintas Batas Provinsi Banten 6
 7. Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Kawasan Strategis dan Kawasan Lintas Batas Provinsi Banten 7
 8. Survey Harga Satuan Bidang Kawasan Permukiman Untuk Tahun Anggaran 2019
 9. Updating Data Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi



10. DED Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Desa Kalanganyar Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang
11. DED Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Desa Rancaseneng Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang
12. DED Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kelurahan Pamulang Timur Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan
13. Survey Harga Satuan Bidang Kawasan Permukiman II Tahun Anggaran 2019
14. Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Provinsi Banten (3)
15. Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Provinsi Banten (2)
16. Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Provinsi Banten (1)
17. Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Provinsi Banten (4)
18. Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Provinsi Banten (5)
- 2) Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 16 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Pengawasan Teknis Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kota Serang
 2. Pengawasan Teknis Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kab. Pandeglang
 3. Pengawasan Teknis Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kota Tangerang Selatan
 4. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Kawasan Strategis dan Kawasan Lintas Batas Provinsi Banten 1



5. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Kawasan Strategis dan Kawasan Lintas Batas Provinsi Banten 2
6. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Kawasan Strategis dan Kawasan Lintas Batas Provinsi Banten 3
7. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Kawasan Strategis dan Kawasan Lintas Batas Provinsi Banten 4
8. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Kawasan Strategis dan Kawasan Lintas Batas Provinsi Banten 5
9. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Kawasan Strategis dan Kawasan Lintas Batas Provinsi Banten 5
10. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Kawasan Strategis dan Kawasan Lintas Batas Provinsi Banten 6
11. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Kawasan Strategis dan Kawasan Lintas Batas Provinsi Banten 7
12. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Provinsi Banten (1)
13. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Provinsi Banten (2)
14. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Provinsi Banten (3)
15. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Provinsi Banten (4)
16. Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Provinsi Banten (5)

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar *Rp. 4.689.261.250,00 (Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)*. Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar *Rp. 3.938.613.720,00 (84,07%)*. Sisa anggaran *Rp. 750.647.530,00 (31,87 %)* merupakan efisiensi belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja pakaian kerja lapangan, belanja



uang saku dan sisa kontrak belanja jasa konsultansi perencanaan, belanja jasa konsultansi pengawasan.

c. Penatagunaan Kawasan Permukiman

Kegiatan ini dilaksanakan guna terkendalinya pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan permukiman kumuh dan bencana. Untuk pelaksanaan tahun 2019 kegiatan ini meliputi 1 sub kegiatan kegiatan seperti diuraikan dibawah ini:

1) Penatagunaan Kawasan Permukiman, kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 18 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Konsultan Individual Penyusunan Profil Permukiman Kumuh di Kab. Lebak
2. Rehabilitasi Sarana Pendidikan
3. Pengadaan Pavling block Banten Lama
4. Pekerjaan Pengecetaan dan Penerangan Jalan
5. Pengadaan Agregat A
6. Pengadaan Tanah Cadas dan Perkerasan Berbutir

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar *Rp. 2.110.588.000,00 (Dua Milyar Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)*. Realisasi progres fisik adalah sebesar 100 % untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar *Rp. 2.008.040.300,00 (95,14%)*. Sisa anggaran sebesar *Rp. 102.547.700,00 (4.86%)* merupakan efisiensi belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli, belanja dokumentasi dan sisa kontrak belanja jasa konsultansi software aplikasi, belanja sarana dan prasaran perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh ini dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini :



2. Indikator Indikator Kinerja Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %) Pencapaian indikator kinerja Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %) ini tidak memenuhi target yang ditetapkan dimana target yang harus dicapai adalah sebesar 85.18% hanya terealisasi sebesar 93.13%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.9 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	1 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	85.18	% 93.13	% 109.33 %

Capaian Indikator Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani sampai dengan tahun anggaran 2019 telah melampaui target dengan capaian sebesar 109.33%.

Permasalahan :

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tahun amggaran 2019 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti dan menghambat pelaksanaan kegiatan. Hal ini terlihat dari capaian indikator sebesar 109.33%. Meskipun ada beberapa permasalahan yang dihadapi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, diantaranya :

1. Pendataan data base perumahan mengalami kendala apabila pada saat pendataan rumah, pemilik rumah tidak berada di tempat sehingga memerlukan cara lain untuk memperoleh data mengenai rumah yang hendak disurvey



Solusi :

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dapat dijabarkan solusinya sebagai berikut :

1. Melakukan perencanaan yang matang sebelum pendataan data base serta menggunakan SDM yang berkualitas dalam melaksanakan pendataan data base perumahan dan kawasan permukiman sehingga mendapatkan hasil pendataan yang berkualitas, efektif dan efisien
2. Apabila pemilik rumah tidak berada di tempat pada saat pendataan, maka salah satu solusinya adalah akan didata kembali pada saat pemilik rumah berada di tempat atau mendapatkan data dari pemerintah kampung maupun kecamatan setempat
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tetap mengusulkan dalam rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kegiatan pembangunan rumah layak huni karena sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah

Adapun Pagu Anggaran TA. 2019 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar Rp. 95.753.198.836,00 (*Sembilan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2019 nya adalah sebesar Rp. 83.696.348.020,00 (*Delapan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Rupiah*), terserap 96.57% dari pagu anggaran.

Adapun Indikator kinerja Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %) ini tidak tercapai dikarenakan terdapat efisiensi belanja pengandaan, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja jasa tenaga ahli, belanja dokumentasi dan sisa kontrak belanja jasa software



aplikasi, belanja sarana dan prasarana perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pada Indikator Kinerja Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %) ini terdapat 4 Kegiatan dan 7 sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Perumahan, meliputi Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 5 Kab/Kota kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 18 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Sosialisasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (5Kab/Kota)
 2. Konsultan Individual/Tenaga Pendukung (4 org x 6 bln)
 3. Pembangunan Gedung Desa Cilograng Kec.Cilograng Kab.Lebak
 4. Pembangunan Gedung Desa Gunung Batu Kec.Cilograng Kab.Lebak
 5. Pembangunan Gedung Desa Cibareno Kec Cilograng Kab.Lebak
 6. Pembangunan Gedung Desa Pasir Bungur Kec.Cilograng Kab.Lebak
 7. Pembangunan Gedung Desa Cikatomas Kec.Cilograng Kab.Lebak
 8. Pembangunan Gedung Desa lebak Tipar Kec.Cilograng Kab.Lebak
 9. Pembangunan Gedung Desa Parungpanjang Kec.Wanasalam
 10. Pembangunan Gedung Desa Ketapang Kec.Wanasalam Kab.Lebak
 11. Pembangunan Gedung Desa Bejod Kec Wanasalam Kab.Lebak
 12. Pembangunan Gedung Desa Bintangresmi Kec.Cipanas Kab Lebak
Pembangunan Gedung
 13. Pembangunan Gedung Desa Cipanas Kec.Cipanas Kab.Lebak
 14. Pembangunan Gedung Desa Wantisari Kec.Leuwidamar Kab.Lebak
 15. Pembangunan Gedung Desa Lebakparahiyang Kec.Leuwidamar Kab Lebak
 16. Pembangunan Gedung Desa Suwakan Kec.Bayah Kab.Lebak



17. Pembangunan Gedung Desa Bayah Barat Kec.Bayah Kab.Lebak
18. Pembangunan Gedung Desa Darmasari Kec.Bayah Kab.lebak
19. Pembangunan Gedung Desa Parungsari Kec.Sajira Kab.Lebak
20. Pembangunan Gedung Desa Curugpanjang Kec.Cimarga Kab.Lebak
21. Pembangunan Gedung Desa Sangiangjaya Kec.Cimarga Kab.Lebak
22. Pembangunan Gedung Desa Cilangkahan Kec.Malingping Kab.Lebak
23. Pembangunan Gedung Desa Sangiangjaya Kec.Malingping Kab.Lebak
24. Pembangunan Gedung Desa Cihujan Kec.Cijaku Kab.Lebak
25. Pembangunan Gedung Desa Pasirkupa Kec.Kalanganyar Kab.Lebak
26. Pembangunan Gedung Desa Labuan Kec.Labuan Kab.Pandeglang
27. Pembangunan Gedung Desa Banyu Mekar Kec Labuan Kab.Pandeglang
28. Pembangunan Gedung Desa Medlasari Kec. Saketi Kab. Pandeglang
29. Pembangunan Gedung Desa Tanjung Jaya Kec.Panimbang Kab.Pandeglang
30. Pembangunan Gedung Desa Giripawana Kec.Mandalawangi Kab.Pandeglang
31. Pembangunan Gedung Desa Sinargalih Kec.Mandalawangi Kab.Pandeglang
32. Pembangunan Gedung Desa Saninten Kec.Kaduhejo Kab.Pandeglang
33. Pembangunan Gedung Desa Cadasari Kec.Cadasari Kab.Pandeglang
34. Pembangunan Gedung Desa Pasir peuteuy Kec. Cadasari Kab.Pandeglang
35. Pembangunan Gedung Desa Cibarani Kec.Cisata Kab. Pandeglang
36. Pembangunan Gedung Desa Cening Kec. Cikedal Kab. Pandeglang
37. Pembangunan Gedung Desa Cimanuk Kec.Cimanuk Kab.Pandeglang



38. Pembangunan Gedung Desa Kadumadang Kec.Cimanuk Kab.Pandeglang
39. Pembangunan Gedung Desa Sumberjaya Kec.Sumur Kab.Pandeglang
40. Pembangunan Gedung Desa Pasireurih Kec. Cipeucang Kab. Pandeglang
41. Pembangunan Gedung Desa Kalanyanyar Kec. Labuan Kab. Pandeglang
42. Pembangunan Gedung Desa Rancateureup Kec. Labuan Kab.Pandeglang
43. Pembangunan Gedung Kelurahan Cilaja Kec. Majasari Kab.Pandeglang
44. Pembangunan Gedung Desa Pancanegara Kec.Pabuaran Kab.Serang
45. Pembangunan Gedung Desa Pancaregang Kec.Tunjung Teja Kab.Serang
46. Pembangunan Gedung Desa Pontang Kec.Pontang Kab.Serang
47. Pembangunan Gedung Desa Kencana Harapan Kec.Pontang Kab.Serang
48. Pembangunan Gedung Kel.Cipete Kec.Curug Kota Serang
49. Pembangunan Gedung Kel.Warungjaud Kec.Kasemen Kota Serang
50. Pembangunan Gedung Kel. Serang Kec.Serang Kota Serang
51. Pembangunan Gedung Kel.Kiara Kec.Walantaka Kota Serang
52. Pembangunan Gedung Kel.Walantaka Kec.Walantaka Kota Serang
53. Pembangunan Gedung Kel. Kemanisan Kec.Curug Kota Serang
54. Pembangunan Gedung Desa Bakung Kec.Kronjo Kab.Tangerang
55. Pembangunan Gedung Desa Pagedangan Udik Kec.Kronjo Kab.Tangerang
56. Pembangunan Gedung Desa Kampung kelor Kec.Sepatan Timur Kab Tangerang



57. Pembangunan Gedung Desa Pagedangan Ilir Kec.Kronjo Kab.Tangerang
58. Pembangunan Gedung Desa Pasir Kec.Kronjo Kab.Tangerang
59. Pembangunan Gedung Desa Bojongrenged Kec.Teluk Naga Kab.Tangerang
60. Pembangunan Gedung Desa Gunung Kenacana Kec.Gunung Kencana Kab.Lebak
61. Pembangunan Gedung Desa Bojongmanik Kec.Bojongmanik Kab.Lebak
62. Pembangunan Gedung Desa Kadurahayu Kec.Bojongmanik Kab.Lebak
63. Pembangunan Gedung Desa Kadujajar Kec.Malimping Kab.Lebak
64. Pembangunan Gedung Desa Pelawad Kec.Ciruas Kab.Serang
65. Pembangunan Gedung Desa Pabuaran Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak
66. Pembangunan Gedung Desa Aweh Kec.Kalanganyar Kab.Lebak
67. Pembangunan Gedung Desa Cemplang Kec.Jawilan Kab.Serang
68. Pembangunan Gedung Kel.Cijoro Pasir Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak
69. Pembangunan Gedung Pengadaan komponen Rumah
- 2) Pembangunan Gedung Pembangunan Perumahan
 1. Bahan Baku Bangunan Pengadaan komponen Rumah
 2. Peningkatan Kualitas PSU Masjid Kopasus Kota Serang
 3. Ke. Sukajaya Kec.Curug Kota Serang
 4. Kp. Gowok Sentul Kel. Sukajaya Kec.Curug Kota Serang
 5. Kp.Tegal Desa Cikoneng Kec. Anyar Kab. Serang
 6. Kel. Kaligandu Kec.Serang Kota Serang Kp. Sumurgede
 7. Peningkatan Kulaitas PSU Pemukiman Prov Banten
 - 1) KP. Renged Rt.03/01 Desa Reged Kec.Kresek Kab.Tangerang
 - 2) KP.Megu.Talaga RT.02/01 Desa Karang Harja Kec.Cisoka Kab.Tangerang



- 3) KP.Cempaka RT.03/08 Desa Cempaka Kec.Cisoka Kab.Tangerang
- 4) KP. Cikarang RT.02/01, Rt.01/01, RT.03/02 Desa Cempaka Kec. Cisoka Kab. Tangerang
- 5) Kp. Gebang/Grobog RT.10/05 Desa Cempaka Kec. Cisoka Kab.Tangerang
- 6) KP. Cisalak RT.01/01 Desa Cireundeu Kec. Solear Kab.Tangerang
- 7) KP. Cisalak RT.02/02 Desa Cireundeu Kec. Solear Kab.Tangerang
- 8) Taman Adiyasa Blok B RT 01,04,03/7 Desa Cikasungka Kec. Solear Kab.Tangerang
- 9) Taman Adiyasa Blok B RT 04,06,05/07 Desa Cikasungka Kec. Solear Kab.Tangerang
- 10) KP. Palasari RT.03/02 Ds.Palasari Kec.Legok Kab.Tangerang
- 11) KP. Kongsu RT.01/03 Desa Serdang Wetan Kec.Legok Kab. Tangerang
- 12) KP.Serdang RT.04/03 Desa Serdang Wetan Kec.Legok Kab.Tangerang
- 13) KP.Muhara RT.12/05 Desa Jayanti Kec. Jayanti Kab.Tangerang
- 14) KP.Pabuaran RT.07/03 Desa Jayanti Kec.Jayanti Kab.Tangerang
- 15) KP.Bendung RT.10/04 Desa Sumur Bandung Kec.Jayanti Kab. Tangerang
- 16) KP.Sempur RT.09/06 dan KP Saradan RT.07/02 Desa Sumur Bandung Kec.Jayanti Kab.Tangerang
- 17) KP.Saradan RT.15/02 Desa Sumur Bandung Kec.Jayanti
- 18) Ds. Cibugel RT.03/RT.07 DS. Cibugel Kec. Cisoka Kab.Tangerang



- 19) Ds. Cibugel RT.02/RT.07 DS. Cibugel Kec. Cisoka Kab.Tangerang
- 20) Desa Rawasan Kec.Cisata Kab.Pandeglang
- 21) RT.02/RW.05 Perumahan Gading Cisoka Blok D5 Desa Selapanjang Kec.Cisoka Kab.Tangerang
- 22) KP. Cikuda RT.05/RW.01 Kel.Cisauk Kec.Cisauk Kab.Tangerang
- 23) Kelurahan Cisauk RT.04/RW.01 Kelurahan Cisauk Kec.Cisauk Kab.Tangerang
- 24) Kelurahan Cisauk RT.06/RW.01 Kelurahan Cisauk Kec.Cisauk Kab.Tangerang
- 25) RT.02/RW.02 Desa Jatake Kec.Pagedangan Kab.Tangerang
- 26) Jl. Kilaur RT.03 / RW.06 Kel.Cisauk Kec.Cisauk Kec. Cisauk Kab.Tangerang
- 27) KP. Baru RT.06/RW.03 Desa Dangdang Kec.Cisauk Kab.Tangerang
- 28) RT.04/RW.01 Desa Kadusirung Kec.cisauk Kab Tangerang
- 29) RT.03/RW.08 Kel.Babakan Kec.Legok kab.Tangerang
- 30) KP. Cisauk Sinyal RT.04 RW.03 Kel.Cisauk Kec.Cisauk Kab.Tangerang
- 31) Jl. Sinang Palai RT.02 dan 03 RW.01 Desa Situgadung Kec. Pagedangan Kab.Tangerang
- 32) Jl. Sinang Palai RT.02 / RW.01 Desa Situgadung Kec. Pagedangan Kab.Tangerang
- 33) Kp. Cibadak RT.07/RW.02 Desa Suradita Kec.Cisauk Kab.Tangerang
- 34) RT.06/RW.04 Desa Malang Nengah Kec.Pagedangan Kab.Tangerang
- 35) RT.04/RW.05 Perum Gading Cisoka Blok C.Desha Selapanjang Kec.Cisoka Kab.Tangerang



- 36) RT.02 /RW.07 Perum Bukit Gading Desa Cangkudu
Kec.Balaraja Kab.Tangerang
- 37) KP.Panggang RW.003 Desa Salapanjang Kec. Cisoka
Kab.Tangerang
- 38) KP.Sangereng RW.004 Desa Salapanjang Kec.Cisoka
Kab.Tangerang
- 39) KP.Panggang Kulon RW.003 Desa Salapanjang Kec. Cisoka
Kab.Tangerang
- 40) KP. Munjul RW.04 Desa Munjul Kec.Solear Kab.Tangerang
- 41) KP.Hanjat RW.05 Desa Munjul Kec Solear Kab.Tangerang
- 42) Desa Dangder RW.05 Kec.Jayanti Kab.Tangerang
- 43) RW.01 Desa Kronjo Kec.Kronjo Kab.Tangerang
- 44) Desa Cisereh Kec.Cisata Kab.Pandeglang
- 45) RT.07 RW.12 Perumahan Taman Kirana Kec.Solear Kota
Tangerang Selatan
- 46) RW.19,20,21 Kel.Serua Ciputat Kec.Ciputat Kota Tangsel
- 47) Jl.Rw 18 Kel. Serua Kec.Ciputat Kota Tangsel
- 48) Gang Goang Parung Benying RT.02/18 Kel.Serua Kec.Ciputat
Kota Tangsel
- 49) Gang Mangga Parung Beunying RT.02/18 Kel. Serua Kec.
Ciputat Kota Tangsel
- 50) RW.08 Perumahan Serua Permai Kel.Benda Baru
Kec.Pamulang Kota Tangsel
- 51) Jalan Misan Kampung Bulak RT.002 RW.009 Kel. Benda Baru
Kec. Pamulang Kota Tangsel
- 52) Jalan Misan Kampung Bulak RW.009 Kel. Benda Baru Kec.
Pamulang Kota Tangsel
- 53) Jl. Dari Pasangrahan Sampai Rumah Sakit desa Cikotok
Kec.Cibeber Kab.Lebak
- 54) KP. Cibayawak Desa Pagelaran Kec.Malingping Kab.Lebak



- 55) Komplek Griya Permata Asri Blok B.11,12 dan 13/Kel Dalung
Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
- 56) Desa Kondangjaya Kec.Cisata Kab.Pandeglang
- 57) Gang Sukaraja Lingkungan Pekarungan Kel.Kagungan
Kec.Serang Kota Serang
- 58) Desa Sodong Kec Saketi Kab.Pandeglang
- 59) Lingkungan Cideheng RT.11 RW.03 Kel.Kemanisan Kec.Curug
Kota Serang
- 60) Lingkungan Kubang LOR RT.009/002 Kel.Kemanisan Kec.
Curug Kota Serang
- 61) Desa Sindaghayu Kec.Saketi Kab.Pandeglang
- 62) KP.Pasir Buah Kel.Sindangsari Kec.Pabuaran Kab.Serang
- 63) Blok KP Sawah RT.02 RW.024 Kel.Sumur Pecung Kec Serang
Kota Serang
- 64) Lingkungan RW.1 Lopang Gede Kel.Lopang Kec.Serang Kota
Serang
- 65) Desa Tegalwangi Kec.Menes Kab.Pandeglang
- 66) Kampung Makmur Jaya Blok B Kel.Drangong Kec.Taktakan
Kota Serang
- 67) KP.Gunungarit Desa Cijakan Kec.Bojong Kab.Pandeglang
- 68) Kel.Dalung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
- 69) Jalan Coo Sakilo Desa Lewi Coo Kec. Muncng Kab.Lebak
- 70) Kampung Kadu Tanggay Desa Purwaraja kec.Menes
Pandeglang
- 71) Jl. Desa Suka Manah Kec.Jiput Kab.Pandeglang
- 72) Kp. Asem Desa Labuan Kec.Mancak Kab.Serang
- 73) Jl. Desa Tegal Kunir LOR Kec.Teluknaga Kab. Tangerang
- 74) Desa Telaga Warna Kec.Pabuaran Kab.Serang
- 75) Desa Pancanegara Kec.Pabuaran Kab.Serang
- 76) Jl.Kmp.Bojong Warna Desa Mekar Sari Kec. Carenang
- 77) Jl.Kmp Babakan Muncang Desa Tanjung Wangi Kec. Muncang



- 78) Jl. Muara Binuangeun KMP.Ranca Pinang Kec.Wanasalam Kab.Lebak
- 79) Desa Sindangsari Kec.Pabuaran Kab.Serang
- 80) JL.KMP Pasir Bingluh Desa Tanjung Sari Kec. Gunung Kencana Kab.Lebak
- 81) KMP Ciawi-Ciladu Ds.Mekarsari Kec.Cibeber Kab.Lebak
- 82) Desa Sirna Galih Kec.Cibeber Kab.Lebak
- 83) Desa Kujang Jaya Kec.Cibeber Kab.Lebak
- 84) Desa Sukamulya Kec.Cibeber Kab.Lebak
- 85) KP.Ciputih Desa Ciredugf Kec.Bojong Kab.Pandeglang
- 86) KP.Dahu RT.01 RW.02 Desa Mekarsari Kec. Bojong Kab.Pandeglang
- 87) KP. Legok Haur RT.008 Desa Majau Kec.Saketi Kab.Pandeglang
- 88) Desa Bulakan Kec.Gunung Kencana Kab.Lebak
- 89) Desa Sindangheula Kec Pabuaran Kab.Serang
- 90) KP.Pakel Masjid Kel Gelam Kec.Cipocok Jaya Kota Serang
- 91) Desa Lebakwangi Kec Lebakwangi Kab.Serang
- 92) Desa Curugpanjang Kec Cikulur Kab.Lebak
- 93) Desa Sangiang Kec. Cimarga Kab.Lebak
- 94) Komp Bumi Mutiara Serang Desa Banjar Agung Kec. Cipocok Kota Serang
- 95) KP.Cimadang Desa Cijakan Kec.Bojong Kab.Pandeglang
- 96) KP. Lengkong Desa Kertaraharja Kec.Banjarsari Kab.Lebak
- 97) Desa Buni Hara Kec. Anyar Kab.Serang
- 98) Taman Graha Asri Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang
- 99) Kel.Tembong Kec.CipocokJaya Kota Serang
- 100) Kel.Banjarsari Kec Cipocok Jaya Kota Serang
- 101) Kelurahan Banten Kec.kasemen Kota Serang
- 102) Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Lingkungan Batok Bali



- 103) Kel Karundang Kec.Cipocok Jaya Kota Serang
- 104) Kelompok Griya Permata Asri Kelurahan Dalung Kec.Cipocok Jaya Kota Serang
- 105) Kelurahan Dalung Kec.Cipocok Jaya Kota Serang
- 106) RW.001 KP.Tegal Desa Cikoneng Kec.Anyar Kab.Serang
- 107) Kel.Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak
- 108) Desa Ciminyak Kec.Muncang Kab.Lebak
- 109) Desa Sindangwangi Kec.Muncang Kab.Lebak
- 110) Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber Kab.Lebak
- 111) Desa Panis Kecamatan Keroncong Kab.Pandeglang
- 112) Desa Cadasari Kec.Cadasari Kab.Pandeglang
- 113) Desa Gunungwangun Kec.Cibeber Kab.Lebak
- 114) Desa Karang Tengah Kec.Pagedangan Kab.Tangerang
- 115) Desa Ranca Iyuh Kec. Panongan Kab.Tangerang
- 116) Kel.Bojongnangka Kec.Kelapa Dua Kab.Tangerang
- 117) Desa Curug Wetan Kec.Curug Kab.Tangerang
- 118) Desa Serdang Wetan Kec. Kec.Legok Kab.Tangerang
- 119) KP.Kebon Pisang Kel.Cisauk Kec.Cisauk Kab.Tangerang
- 120) KP.Erpak Kel.Cisauk Kec.Cisauk Kab.Tangerang
- 121) KP.Cicayur Kel.Cisauk Kec.Cisauk Kab.Tangerang
- 122) Ds.Suradita Kec.Cisauk Kab.Tangerang
- 123) Kel.Sukamulya Kec.Cikupa Kab.Tangerang KP.Kadu
- 124) Kel.Sukamulya Kec.Cikupa Kab.Tangerang
- 125) Jl.Bungur Kel.Mekarbakti Kec.Panongan Kab.Tangerang
- 126) Jl.KH.Acim Kel.Mekar Bakti Kec.Panongan Kab Tangerang
- 127) Jl.Mekarbakti Kel.Mekarbakti Kec Panongan Kab.Tangerang
- 128) Jl.Mekarbakti Kel.Mekarbakti Kec Panongan Kab.Tangerang
- 129) Desa Dangdang Kec.Cisauk Kab.Tangerang
- 130) Desa Cipaeh Tengah Kec.Gunung Kalker Kab.Tangerang
- 131) Kel.Pakuhaji Kec.Pakuhaji Kab.Tangerang



- 132) Perumahan Bumi Indah Desa Sukamantri Kec. Pasarkemis Kab. Tangerang
- 133) Kel. Kutajaya Kec. Pasarkemis Kab. Tangerang
- 134) Kel. Kutabaru Kec. Pasarkemis Kab. Tangerang
- 135) Kel. Jurang Manggu Timur Kec. Pondok Aren Kota Tangsel
- 136) Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan
- 137) Kel. Perigi Baru Kec. Pondok Aren Kota Tangsel
- 138) Kel. Bakti Jaya Kec. .Setu Kota Tangerang Selatan
- 139) Kel. Poris Pelawad Kec. Cipondoh Kota Tangerang
- 140) Ling. Sayabulu Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang
- 141) KP. Kenang Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota
- 142) Desa Ujung Jaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang
- 143) Kel. Sukawana Kec. Serang Kota Serang
- 144) Kel. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang
- 145) Kel. Priyayi Kec. Kasemen Kota Serang
- 146) Kel. Pageragung Kec. Walantaka Kota Serang
- 147) Kel. Kaloran Kec. Walantaka Kota Serang
8. Ruang Terbuka Publik
 - 1) Kelurahan Serang Kec. Serang Kota Serang
 - 2) Desa Cikoneng Kec. Anyar Kab. Serang
9. Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Masjid Lebak
10. Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Masjid Pandeglang
11. Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Masjid Serang
- b. Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan, meliputi sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan Teknis Bidang Permukiman kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 18 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Updating SPM Bidang Perumahan
 2. Bimtek Perencanaan Perumahan
 3. Bimtek Pengawasan Perumahan



4. Pendataan Rumah Rawan Bencana Provinsi
 5. Belanja Bahan Material Komponen RISHA
 6. Belanja bahan pelatihan Bimtek perencanaan dan pengawasan perumahan
 7. Belanja Bahan baku bangunan perencanaan teknik teknologi dan bahan bangunan strategi
 8. Jasa Konsultasi Perencanaan PSU Perumahan
 9. Pemetaan Perumahan Provinsi Tahun 2019 pada Wilayah Utara
 10. Pemetaan Perumahan Provinsi Tahun 2019 pada Wilayah Selatan
 11. SID Rumah khusus pada kawasan strategis perbatasan Kab/Kota
 12. SID Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi
 13. Penyusunan Laporan capaian SPM Bidang Perumahan tahun 2019
 14. Pendataan rumah rawan bencana Provinsi (Wilayah Kab Pandeglang)
 15. DED Rumah Deret
 16. DED Ruang terbuka hijau (RTH)
 17. DED Sarpras Masjid
 18. DED PSU Jalan Lingkungan
 19. Digitalisasi data PK RTLH & PSU Permukiman Tahun 2019
 20. Pembangunan Rumah Contoh RISA
- 1) Pengawasan Teknis Bidang Permukiman kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 18 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Rapat konsolidasi verifikasi dan validasi data RTLH
 2. Rapat Evaluasi verifikasi dan validasi data RTLH
 3. Pengawasan pembangunan Masjid Kopasus
 4. Pengawasan pembangunan Masjid Kab/Kota
 5. Pengawasan PK-RTLH Kec.Cilograng,Bayah,Malingping,Cijaku



6. Pengawasan PK-RTLH Kec. Cipanas, Sajira, Kalanganyar, Leuwidamar, Wanasalam, Cihara, Cimarga
7. Pengawasan PK-RTLH Kec.Labuan, Saketi, Panimbang, Cisata, Cikeudal, Cimanuk, Sumur
8. Pengawasan PK-RTLH Kec.Mandalawangi, Kaduhejo, Cadasari, Cipeucang
9. Pengawasan PK-RTLH Kec Pabuaran,Pontang,Kec.Curug Kec.Serang dan Walantaka
10. Pengawasan PK-RTLH Kec Kronjo, Sepetan Timur dan Teluk Naga
11. Pengawasan PK-PSU Kec.Legok Jayanti
12. Pengawasan PK-PSU Kec.Cisauk
13. Pengawasan PK-PSU Kec.Pagedangan, Balaraja, Solear, Kronjo,Kresek
14. Pengawasan PK-PSU Kec.Kp Melayu, Ds.Selapanjang,Ds. Cengkudu
15. Pengawasan PK-PSU Kec.Cisokai
16. Pengawasan PK-PSU Kec.Solear, Pamulang,Ciputat
17. Pengawasan PK-PSU Kec.Cibeber, Malingping, Wanasalam
18. Pengawasan PK-PSU Kec. Muncang, Gunung Kencana, Cikulur, Cimarga
19. Pengawasan PK-PSU Kec.Cisata, Saketi
20. Pengawasan PK-PSU Kec.Menes dan Bojong
21. Pengawasan PK-PSU Kec.Pabuaran, Lebakwangi, Mancak
22. Pengawasan PK-PSU Kec.Kasemen, Serang, Curug, Taktakan
23. Pengawasan PK-PSU Kec. Cipocok Jaya
24. Pengawasan PK-PSU Ruang Terbuka Hijau
25. Pengawasan Sarpras Masjid
26. Pengawasan Bantuan PSU
27. Pengawasan Bantuan PK PSU Kota Tangsel
28. Pengawasan Bantuan PK PSU Kota Serang
29. Pengawasan Bantuan PK PSU Kab. Serang, Kab Pandeglang, Kab Lebak



30. Pengawasan Bantuan PK PSU Kab.Tangerang 1
 31. Pengawasan Bantuan PK PSU Kab.Tangerang 2
 32. Pengawasan Bantuan PK PSU Kab.Tangerang 3
 33. Pengawasan RK RTLH Kab.Lebak Kab Pandeglang, Kab.Serang
- c. Kegiatan Penatagunaan Pengembangan Perumahan, meliputi sub kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penatagunaan Pengembangan Perumahan kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 18 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Sosialisasi Relokasi Bangunan dikawasan Inti Banten Lama 1
 2. Sosialisasi Relokasi Bangunan dikawasan Inti Banten Lama II
 3. Sosialisasi Pembangunan PSU Permukiman Perumahan
 4. Pembinaan Perumahan Sehat dan Layak Huni
 5. Pendataan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan di Provinsi Banten
 6. Rencana Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Perumahan
 7. Konsultan Individu Kesekretariatan Pokja Provinsi Banten (2 orang)
 8. Konsultan Individu Pembuatan sytem aplikasi pendataan perumahan
 9. Konsultan Individu pemberdayaan komunitas perumahan di Provinsi Banten
 10. Konsultan Individu Pendampingan
 11. Pembangunan PSU Perumahan dan Permukiman
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan
 - 1) Penyelenggaraan Pengadaan Lahan kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 18 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Jasa Appraisal ganti kerugian tanah
 2. Konsultan individu pendampingan pengadaan lahan untuk relokasi adanya program pembangunan Provinsi



3. Jasa Appraisal ganti kerugian tanah pengadaan lahan hunian tetap Kec.Sumur Desa Sumber Jaya
4. Jasa Appraisal ganti kerugian tanah pengadaan lahan hunian tetap Kec.Sumur
5. Jasa Appraisal ganti kerugian tanah pengadaan lahan hunian tetap Kec.Sumur
6. Jasa Appraisal ganti kerugian tanah pengadaan lahan hunian tetap Kec.Sumur
7. Jasa Appraisal ganti kerugian tanah pengadaan lahan hunian tetap Kec.Labuan
8. Jasa Appraisal ganti kerugian tanah pengadaan lahan hunian tetap Kec.Carita
9. Pengadaan Lahan untuk Relokasi adanya Program pembangunan provinsi seluas 26.000 m²
10. Biaya Ukur, Pemeriksaan Tanah dan Sertifikasi oleh BPN
11. Pengadaan lahan untuk pembangunan perumahan seluas 20.000 m²
12. Biaya ukur, pemeriksaan tanah dan sertifikasi oleh BPN
13. Pengamanan/pembersihan lahan untuk pembangunan perumahan
14. Penyiapan lahan untuk pembangunan perumahan
15. Pengadaan Lahan Huntap
 - 1) Pengadaan Lahan untuk hunian tetap Kp. Pasimalang Desa Sumber Jaya Kec.Sumur seluas 49.000 m²
 - 2) Pengadaan Lahan untuk hunian tetap Kp. Palingping Desa Tunggal Jaya Kec.Sumur seluas 1.600 m²
 - 3) Pengadaan Lahan untuk hunian tetap Kp. Pasirjaya Desa Cigorondong Kec.Sumur seluas 8.600 m²
 - 4) Pengadaan Lahan untuk hunian tetap Kp. Paniis Desa Taman Jaya Kec.Sumur seluas 6.400 m²
 - 5) Pengadaan Lahan untuk hunian tetap Kp. Cikaung Desa Ujung Jaya Kec.Sumur seluas 2.000 m²



- 6) Pengadaan Lahan untuk hunian tetap Kp. Sepen Desa Banyumekar Kec.Labuan seluas 49.000 m2
 - 7) Pengadaan Lahan untuk hunian tetap Kp. Cibenda Desa Sukarame Kec.Carita seluas 10.000 m2
 - 8) Biaya Ukur, pemeriksaan tanah dan sertifikasi oleh BPN
- 2) Perencanaan Pengadaan Lahan kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 18 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan Pengadaan Lahan untuk pembangunan rumah khusus
 2. Konsolidasi dan penatagunaan lahan pembangunan perumahan
 3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian perumahan

Dari ke 2 sub kegiatan tersebut diatas telah mencapai progress fisik sebesar 100%.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Perumahan ini dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini :



Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Serang di Kp. Cikoneng DESA Batu Kuwung KEC. Padarincang KAB. SERANG (Material)



	
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Serang di Kp. Cikoneng DESA Batu Kuwung KEC. Padarincang KAB. SERANG (Material)	
	
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pandeglang di DESA RANCATEUREUP KEC. LABUAN KAB. PANDEGLANG (Material)	
	
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pandeglang di DESA TANJUNG JAYA KEC. PANIMBANG KAB. PANDEGLANG (Material)	



	
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pandeglang di Desa medalsari Kec. Saketi Kab. Pandeglang	



	
	
	
 sukemah bangun lor	 suenah pasir petey



Material yang dipergunakan untuk pembangunan Rumah layak Huni
(Pembelian Komponen Rumah)



3. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Pencapaian Indikator Kinerja Program Penataan Bangunan dan Lingkungan dapat dilihat dalam tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.10 Pencapaian Indikator Kinerja Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian (%)		
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	50.00	%	39.89	%	79.78	%
		2	persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	69.00	%	90.67	%	131.41	%
		Rata – Rata Capaian Indikator Kinerja							105.59

Pagu Anggaran TA. 2019 untuk program ini adalah sebesar Rp. 260.449.601.144,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam ratus Seribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2019 adalah sebesar Rp. 168.238.254.978,00 (*Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Tujuh Delapan Rupiah*), terserap 64.59% dari pagu anggaran.

Dari tabel 3.3 diatas terlihat ada 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun evaluasi dan analisis capaian setiap indikator kinerja tersebut diuraikan dibawah ini :



1. Indikator Kinerja persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %) Pencapaian indikator kinerja persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %) ini tidak memenuhi target yang di tetapkan dimana target yang harus dicapai adalah sebesar 50.00% hanya terealisasi sebesar 39.89%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.11 Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Air Bersih Dan Sanitasi (M³)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	50.00	% 39.89	% 79.78

Pagu Anggaran TA. 2019 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar Rp. 139.410.429.844.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan ratus empat Puluh Empat rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2019 nya adalah sebesar Rp. 56.437.834.543,00 (*Lima Puluh Enam Milyar Empat ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), terserap 64.19% dari pagu anggaran.

Adapun Indikator kinerja persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %) ini tidak tercapai dikarenakan adanya pekerjaan Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre (Multiyears) belum dilaksanakan pada TA. 2019 sebesar Rp. 80.000.000.000,00, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi dan akan dilanjutkan pada TA. 2020.



Pada Indikator Kinerja persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %) ini terdapat 3 Kegiatan dan 5 sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Penataan Sarana dan Prasarana KP3B, meliputi sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penataan Sarana dan Prasarana KP3B

1. Penataan Workshop KP3B
2. Penataan Kantin KP3B
3. Penataan Taman Pintar KP3B

Pagu Anggaran TA. 2019 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar Rp. 4.955.554.844,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2019 nya adalah sebesar Rp. 121.039.171.300,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sebeleas Ribu Delapan ratus Sembilan Belas Rupiah*) terserap 87.71% dari pagu anggaran, terdapat sisa anggaran dikarenakan adanya efesiensi belanja listrik, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman kegiatan dan sisa kontrak belanja jasa konsultansi pengawasan.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi, meliputi sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 12 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Banten Lama
2. Penataan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman di Kawasan Strategis Sawarna (Jalan Lingkungan), meliputi :
 - Tanjung Layar, Sawarna Kab. Lebak



- Desa Cidikit, Kec. Bayah Kab. Lebak
 - Legon Pari, Sawarna Kab. Lebak
3. Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kawasan Strategis Sawarna (Jalan Lingkungan)
- Goa Lalay
 - Desa Bayah Barat
 - Desa sawarna Timur
 - Desa Sawarna
 - Kp. Cipiter
 - Kp. Bayah Tugu
 - Kp. Purwodadi Barat
 - Kp. Cinangga
 - Kp. Leles
 - Kp. Babakan Inpres
 - Kp. Ciantir
 - Kp. Tumenggung - Mulyasari
4. Penataan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman di Kawasan Strategis Kab. Lebak (jalan Lingkungan)
- Desa Gunungbatu, Kec. Ciligrang
 - Desa Cikatomas, Kec. Ciligrang
 - Desa Cikamunding, Kec. Ciligrang
5. Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kawasan Strategis Kab. Lebak (Jalan Lingkungan)
- Kp. Pasir Sireum - Kp. Pasir Buntu Cibolang Desa Lebak Pendeuy
 - Kp. Cisilisung - Kp. Sibilik Desa Girilya
 - Kp. Hewalat Desa Sogog
 - Kp. Ciawi Surat, Desa Gunung Gede
 - Kp. Shanghiang - Kp. Bojong Manik Desa Shanghiang



- Kp. Bambu, Kuning Desa Maja Baru
- Kp. Panyandungan Desa Binong
- Kp. Gembrong Rt 001/004 Desa Pagelaran
- Kp. Babakan Jaha RT 008/003 Desa Rahong
- Kp. Cobogo RT 011/004 Desa Malingping Utara
- Kp. Cihambali RW 01 ke Kp. Cisereh RW 03 Desa Cihambali
- Kp. Sitoko Baranang Siang Rt.04/01 Desa Pasir Haur
- Kp. Numpi Rt 04/04 Desa Sangiang
- Kp. Sampeureun Girang, Makam Gede Desa Tanjung Sari
- Kp. Susukan - Kp. Susukan Desa Mekar Jaya
- Kp. Girimukti - Kp. Bababakan Jatake - Kp. Pasir Eurih Desa Mekarjaya
- Kp. Nangewer Desa Cijengkol
- Kp. Ranca Gede Desa Jayasari
- Kp. Cimuncang Desa Cibarengkok
- Kp. Simpang IV Desa Kertaharja
- Kp. Babakan Salam Desa Cibatur Keusik
- Kp. Ciuyah Rt06/01 Desa Ciuyah
- Kp. Kopi RT 02/03 Desa Parung Sari
- Desa Pajagan Kec. Sajira Kab. Lebak
- Desa Pamubulan Kec. Bayah Kab. Lebak
- Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak
- Desa Suwakan Kec. Bayah Kab. Lebak
- Desa Cisuren Kec. Bayah Kab. Lebak
- Desa Karangkamulyan Kec. Cihara Kab. Lebak
- Desa Lebak Pandeuy Kec. Cihara Kab. Lebak
- Desa Bintang Resmi Kec. Ciapanas Kab. Lebak
- Jln Raden mina kp kaum pasar Rt 08 Rw 03 Desa Malingping selatan Kec. Malingping Kab. Lebak



- Jln Rd Abas kp Lbk jaha menuju jln Binglu Rt 07 Rw 03 Desa Malingping selatan Kec. Malingping Kab. Lebak
 - Kp. Satiun - Kp. Buleud Ds. Cimandiri Kec. Panggarangan Kab. Lebak
 - Kp. Sirnasari Ds. Karangkamulyan Kec. Cihara Kab. Lebak
 - Kp. Pasir Salam Ds. Cilograng Kec. Cilograng Kab. Lebak
 - Kp. Ciseruh Ds. Cihambali Kec. Cibeber Kab. Lebak
 - Kp. Shanghiang - Kp. Bojong Kakak Ds. Shanghiang Kec. Malingping Kab. Lebak
 - Desa Bintang Resmi Kec. Cipanas Kab. Lebak
 - Jl. Lebak Pendeuy- Jamidah Desa Pasir bungur Kec. Cilograng Kab. Lebak
6. Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kawasan Strategis Kab. Pandeglang
- Kp. Panyingkiran Desa Mekarjaya
 - Kp. Paojan Kidul Desa Mekarjaya
 - Kp. Cisarua Desa Citeureup
 - Kp. Tujuh Sejahtera Desa Gombong
 - Kp. Cimanggu Desa Janaka
 - Kp. Cadasari Lor Desa Ciinjuk
 - Kp Sembilan Subur Desa Gombong
 - Kp. Cikadongdong RT03/02 Desa Waringinjaya
 - Kp. Cibaliung RT01/03 Desa Cibaliung
 - Kp. Sabrang RT 01/07 Desa Cibaliung
 - Kp. Berung Desa Ciinjuk
 - Kp. Sarabaya Desa Ciinjuk
 - Kp. Wirasinga RT 01- 03 / 02 Desa Wirasinga
 - Desa Waringin Jaya Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang
 - Desa Ciinjuk Kec. Cadasari Kab. Pandeglang



- Kp. Sabrang Lembur Gede Ds. Katumbiri Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang
 - Kp. Sempur Ds. Ujung Jaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang
 - Babakan Kiara Ds. Panimbang Jaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang
 - Kp. Sejahtera Ds. Gombong Kec. Panimbang Kab. Pandeglang
 - Kp. Kudu Bungban-Pamatang Handap Ds. Sikulan Kec. Jiput Kab. Pandeglang
 - Kp. Canggong Ds. Salapraya Kec. Jiput Kab. Pandeglang
 - Kp. Sukamanah/Desa Purwaraja Kec. Menes Kab. Pandeglang
 - Kp. Cimagang/Desa Cijakan Kec. Bojong Kab. Pandeglang
 - Kp. Gunung Cangrit/Desa Cijakan Kec. Bojong Kab. Pandeglang
 - Kp. Kadu Pamatang Handap - Kp. Kadu Bangban Desa Sikulan Kec. Jiput Kab. Pandeglang
 - Kp. Pasir Koranji Desa Sikulan Kec. Jiput Kab. Pandeglang
 - Kp. Congkar Desa Salapraya Kec. Jiput Kab. Pandeglang
 - J. Poros Desa Kp. Enam (6) Pelopor Kp. Pejuang Desa Kec. Panimbang Kab. Pandeglang
 - Kp. Sukajadi Desa Gombong Kec. Panimbang Kab. Pandeglang
 - Jl. Kp. Cikaung Girang Desa Ujung Jaya Kec. Sumur Kab. Pandeglang
7. Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur di Kawasan Perkotaan Serang Cilegon (Jalan Lingkungan)
- Kp. Cikeupuh RT 04/06
 - Kp. NyiKembang Rw.03 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang
 - Warna Sari Rw.04 Kel. Warna Sari Kec. Citangkil
 - Kp. Kuranji Jalem RT 04/01
 - Kp. Jakung Legok RT 024/01
 - Kp. Gempol RW 17



- Kp. Cipaung RT 03/04
- Kp. Lebak RT 09/04
- Kp. Citeurep 1 RT 04/02
- Kp. Cibodas RT 05/01
- Link. Kubang Lesung Rw. 04 Kel. Taman Baru Kec. Citangkil
- Link. Bebulak Barat Rw.03 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta
- Kp.Kuranji Kidul RT 01/02
- Kp. Sepang Baru RT 01/05
- Kp. Cimoyan RT 01/04
- Kp. Sentul RT 01/07
- Kp. Santoan RT 06/02 Desa Suka Menak
- Kp. Kondang Manis Rt. 02/02
- Kp. Batuluhur - Kubang Rt. 015/05
- Cipare Lor Rt. 03 Rw. 01 Kel. Bendung Kec. Kasemen Kota Serang
- Kp. Kecacang Kel. Sawah Luhur Kota Serang
- Kp. Tegal Sapan Ds. Petir Kec. Petir Kab. Serang
- Komp. Hegar Alam Rt. 02/22 Kel. Sumur Pecung Kel. Serang
- Desa Tenjo Ayu Kec. Tanara Kab. Serang
- Kp. Kejaroan Ds. Rancasanggal Kec. Cinangka Kab. Serang
- Kp. Cibodas Ds. Kadubeureum Kec. Padarincang Kab. Serang
- Kp. Cikampak Kelurahan Sukajaya Kec. Curug Kota Serang
- Desa Panyaungan Jaya Kec. Ciomas Kab. Serang
- Kp. Gowok Kelurahan Cikampak Kec. Curug Kota Serang
- Kp. Cilandak RT 01/01 Desa Bojong Menteng Kec. Tanjung Teja Kab. Serang
- Kp. Cilandak RT 06/01 Desa Bojong Menteng Kec. Tanjung Teja Kab.Serang



- Kp. Cilandak RT 06/01 Desa Bojong Menteng Kec. Tanjung Teja Kab.Serang
 - Kp. Cilandak RT 14/01 Desa Bojong Menteng Kec. Tunjung Teja Kab. Serang
 - Komp. Taman Mutiara Indah Blok A6 No. 28 RT. 06 RW. 16 Kel. Kaligandu Kec. Serang, Kota Serang
 - Komp. Bukit Ciracas Permai RT. 01 RW 10 Kel. Serang Kec. Serang, Kota Serang
 - Kp. Pasir Asem Kel. Tembong Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
 - Kp. Cikulur Baru Kel.Serang Kec. Serang Kota Serang
 - Kp. Kaligandu Selatan Kel. Kaligandu Kec. Serang, Kota Serang
 - Kp. Domba Kel. Lopang Kec. Serang Kota Serang
 - Kp. Kaliwadas Kel. Lopang Kec. Serang Kota Serang
 - Komp. Bumi Agung Permai Kel.Unyur Kec. Serang Kota Serang
 - Perum Warnasari RT 06 RW. 07
 - Desa Pancanegara Kec. Pabuaran Kab. Serang
8. Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Center
 9. Penataan Banten Lama (Tahap II)
 10. Pembangunan Pos Jaga 3 Unit
 11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kawasan Banten Lama
 12. Pembangunan Sarana Penunjang Wudhu
- 2) Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Pagu Anggaran TA. 2019 untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 134.454.875.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2019 nya adalah sebesar Rp. 51.992.011.819,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sebeleas Ribu Delapan ratus Sembilan Belas Rupiah*) terserap 38.67% dari pagu anggaran, terdapat sisa anggaran dikarenakan adanya efesiensi



belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Bahan Bakar Minyak/gas, Belanja Listrik, Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan, Uang Makan Tambahan (Extra Fooding), Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/ Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Sewa Meja Kursi, Belanja Sewa Tenda dan Sisa Kontrak belanja sarana dan prasarana perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta hasil pengurangan PHO. Sementara terdapat pula anggaran yang tidak digunakan yaitu Pekerjaan Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre (Multiyears) belum dilaksanakan pada TA. 2019 sebesar *Rp. 80.000.000.000,00*, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi dan akan dilanjutkan pada TA. 2020.

Dari ke 5 sub kegiatan tersebut diatas telah mencapai progress fisik sebesar 69.95%.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi ini dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini :



DESA BAYAH BARAT Kec. BAYAH Kab. LEBAK



DESA KARANGKAMULYAN Kec. CIHARA Kab. LEBAK



DESA SUWAKAN Kec. BAYAH Kab. LEBAK



Kp. COBOGO RT 011/004 DESA MALINGPING UTARA KAB. LEBAK



BENTENG SPEELWIJK	
MESJID PECINAN	
KAIBON	
PENATAAN BANTEN LAMA TAHAP II	



	
BKD	
	
DINAS PERHUBUNGAN	
	
DP3AKB	
	
DINAS KOPERASI	
	
DPMD	



2. Indikator Indikator Kinerja persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %) Pencapaian indikator kinerja persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %) ini tidak memenuhi target yang di tetapkan dimana target yang harus dicapai adalah sebesar 69.00% hanya terealisasi sebesar 90.67%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.12 Pencapaian Indikator Kinerja persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	69.00 %	90.67 %	131.41 %

Pagu Anggaran TA. 2019 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar Rp. 121.039.171.300,00 (*Seratus Dua Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2019 nya adalah sebesar Rp. 111.800.420.435,00 (*Seratus sebeleas Milyar Delapan ratus Juta Empat ratus Dua Puluh Ribu Empat ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), terserap 92.37.60% dari pagu anggaran.

Adapun Indikator kinerja persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %) ini tidak tercapai dikarenakan adanya Pekerjaan Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar (progres fisik 92 %) putus kontrak dikarenakan terdapat pekerjaan yang belum selesai di kerjakan (Finishing Infrastruktur sekitar OPD dan Lancscepe).

Pada Indikator Kinerja persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %) ini terdapat 1 Kegiatan dan 2 sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:



a. Kegiatan Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi, meliputi sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 15 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Asrama BLKI
2. Pemeliharaan Padepokan Pencak silat
3. Pemeliharaan Bumi Perkemahan Cikujang
4. Pemeliharaan Gedung Olah Raga
5. Penataan Kawasan Kopasus
6. Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana lainnya di Kejati Banten
7. Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana lainnya di Polda Banten
8. Peningkatan Rumah Korem
9. Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar
10. Penataan Landscape Gedung PKK
11. Penataan Interior Gedung PKK
12. Pemeliharaan Gedung Bumi Perkemahan Cikujang
13. Pembangunan Landscape dan Penataan Tribun GOR
14. Pemeliharaan Guest House Padepokan Silat
15. Penataan Tugu Batas Provinsi

2) Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Pagu Anggaran TA. 2019 untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 134.454.875.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2019 nya adalah sebesar Rp. 51.992.011.819,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sebeleas Ribu Delapan ratus Sembilan Belas Rupiah*) terserap 38.67% dari pagu anggaran, terdapat



sisanya dikarenakan adanya efisiensi belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja listrik, belanja penggandaan, belanja jasa tenaga kerja lapangan, belanja uang saku, belanja perlengkapan pakaian kerja lapangan, belanja jasa narasumber/instruktur, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan sisa kontrak belanja sarana dan prasarana perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta pengurangan PHO pekerjaan pembangunan gedung PHO dan Infrastruktur dasar dan tidak selesainya pekerjaan Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar (Putus kontrak).

4. Program Keciptakarya

Pencapaian Indikator Kinerja Program Keciptakarya dapat dilihat dalam tabel 3.13 berikut :

Tabel 3.13 Pencapaian Indikator Kinerja Program Keciptakarya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Program Keciaptakaryaan	1 persentase Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)	76.15	%	73.68	%	96.76	%
		2 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)	75.57	%	79.71	%	105.48	%
		3 Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	20.00	%	0.00	%	0.00	%
		Rata – Rata Capaian Indikator Kinerja					101.12	%



Pagu Anggaran TA. 2019 untuk program ini adalah sebesar Rp. 119.433.751.770,00 (*Seratus Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Yiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2019 adalah sebesar Rp. 89.097.163.312,00 (*Delapan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga ratus Dua Belas Rupiah*), terserap 74.60% dari pagu anggaran.

Dari tabel 3.3 diatas terlihat ada 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun evaluasi dan analisis capaian setiap indikator kinerja tersebut diuraikan dibawah ini :

1. Indikator Kinerja persentase Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %) Pencapaian indikator kinerja persentase Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %) ini tidak memenuhi target yang di tetapkan dimana target yang harus dicapai adalah sebesar 76.15% hanya terealisasi sebesar 73.68%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.14 Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Air Bersih Dan Sanitasi (M³)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Keciptakaryaan	1 persentase Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)	76.15	% 73.68	% 96.76 %

Pagu Anggaran TA. 2019 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar Rp. 69.045.000.000,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Lima Juta rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2019 nya adalah sebesar Rp.



61.348.981.533,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Tiga ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), terserap 88.85.19% dari pagu anggaran.

Adapun Indikator kinerja persentase Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %) ini tidak tercapai dikarenakan adanya Pekerjaan pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Desa Sukamanah Kec. Menes kab. Pamdeglang tidak diserap, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi dan Pekerjaan Pembangunan WTP Sindang Heula + Reservoir Pipa Distribusi (92%) tidak selesai (putus kontrak).

Pada Indikator Kinerja persentase Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %) ini terdapat 3 Kegiatan dan 5 sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih, meliputi sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Startegis kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 10 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis Kab Serang
 2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis Kota Serang
 3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis Kab.Lebak
 4. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis Kab.Pandeglang
 5. Pemasangan Pipa Transmisi dan distribusi Air Bersih IKK (Ibu kota Kecamatan)
 - Kec. Maja Kab. Lebak



- Kec. Ciligrang Kab. Lebak
 - Kec. Sajira Kab. Lebak
6. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis Kab. Serang (Aspirasi)
 7. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis Kab. Tangerang (Aspirasi)
 8. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis Kota Serang (Aspirasi)
 9. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis Kab. Tangerang
 10. Pembangunan Infrastruktur SPAM Lintas Daerah (Pembangunan WTP Sindang Heula + Reservoir Pipa Distribusi)
- 2) Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Minum kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 3 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Sosialisasi Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis Kab. Lebak
 2. Sosialisasi Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis Kab. Pandeglang
 3. Sosialisasi Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis Kab. Serang

Pagu Anggaran TA. 2019 untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 69.045.000.000,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Lima Juta rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2019 nya adalah sebesar Rp. 61.348.981.533,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Tiga ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) terserap 88.67% dari pagu anggaran, terdapat sisa anggaran dikarenakan adanya efisiensi belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Bahan Bakar Minyak/gas, Belanja Listrik, Belanja



Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan, Uang Makan Tambahan (Extra Fooding), Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumberefisiensi belanja penggandaan, belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja jasa narasumber/instruktur, belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja telepon/faksimil/internet, belanja listrik, belanja jasa konsultasi survey dan sisa kontrak belanja sarana dan prasarana perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Sementara itu terdapat anggaran yang tidak digunakan yaitu :

1. Pekerjaan pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Desa Sukamanah Kec. Menes kab. Pamdeglang tidak diserap, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi
2. Pekerjaan Pembangunan WTP Sindang Heula + Reservoir Pipa Distribusi (92%), dibayarkan sesuai berita acara hasil pekerjaan.

Dari ke 5 sub kegiatan tersebut diatas telah mencapai progress fisik sebesar 100%.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih ini dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini :





	
KP. BABAKAN BANDUNG RT. 01 RW. 02 DESA CIKIRUHWETAN KEC. CIKEUSIK KAB. PANDEGLANG	
	
KP. JERUK GIRANG RT. 03/ 11 KEL. SUKARATU KEC. MAJASARI KAB. PANDEGLANG	
	
KP. BANYU ASIH DESA BANYUMUNDU KEC. KADUHEJO KAB. PANDEGLANG	



	
DESA BATUKUWUNG KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG	
	
PESANTREN NURUL ILMI DARUNNAJAH KP. PETANJUNGAN DESA SINDANGHEULA KEC. PABUARAN KAB. SERANG	
	
KP. KADU BEBEK DESA CEMPLANG KEC. CIOMAS KAB. SERANG	



	
Pemasangan Pipa Transmisi dan Distribusi Air Bersih IKK (Ibu Kota Kecamatan) Kec. Maja Kab. Lebak	
	
Pembangunan Sindang Heula	



2. Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %) Pencapaian indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %) ini tidak memenuhi target yang ditetapkan dimana target yang harus dicapai adalah sebesar 75.57% hanya terealisasi sebesar 79.71%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut ini :

Tabel 3.15 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)

1	Program Keciaptakaryaan	1	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)	75.57	%	79.71	%	105.48 %

Pagu Anggaran TA. 2019 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar Rp. 4.909.000.000,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2019 nya adalah sebesar Rp. 4.509.306.993,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Semilan ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), terserap 94.72% dari pagu anggaran. Adapun Indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %) ini tidak tercapai dikarenakan adanya efisiensi belanja penggandaan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja jasa konsultansi survey.

Pada Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %) ini terdapat 1 Kegiatan dan 2 sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi, meliputi sub kegiatan sebagai berikut :



- 1) Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Startegis kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 4 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis Kab.Lebak
 2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis Kab.Serang
 3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis Kab. Tangerang (Aspirasi)
 4. Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis Kab. Serang (Aspirasi)
- 2) Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 1 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Updating Database Sanitasi

Pagu Anggaran TA. 2019 untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.909.000.000,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2019 nya adalah sebesar Rp. 4.509.306.993,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Semilan ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), terserap 94.72% dari pagu anggaran.

Adapun Indikator kinerja Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %) ini tidak tercapai dikarenakan adanya efisiensi belanja penggandaan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja jasa konsultasi survey.

Dari ke 5 sub kegiatan tersebut diatas telah mencapai progress fisik sebesar 100%.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih ini dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini :



KP. CIPICUNG RT. 01 RW. 01 DESA CISITU KEC. CIOMAS KAB. SERANG	
DESA CINANGKA KECAMATAN CINANGKA KABUPATEN SERANG	
DESA RANCASANGGAL KECAMATAN CINANGKA KABUPATEN SERANG	



3. Kinerja Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %) Pencapaian indikator kinerja Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %) ini tidak memenuhi target yang di tetapkan dimana target yang harus dicapai adalah sebesar 20.00% hanya terealisasi sebesar 0.00%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut ini :

Tabel 3.16 Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)

1	Program Keciptakaryaan	1	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	20.00	%	0.00	%	0.00	%

Pagu Anggaran TA. 2019 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar Rp. 15.559.000.000,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2019 nya adalah sebesar Rp. 4.462.875.694,00 (*Empat Milyar Empat Ratus Enam puluh Dua Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), terserap 28.68% dari pagu anggaran.

Adapun Indikator kinerja Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %) ini tidak tercapai dikarenakan adanya efisiensi belanja penggandaan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja jasa konsultansi survey.

Pada Indikator Kinerja Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %) ini terdapat 1 Kegiatan dan 2 sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan, meliputi sub kegiatan sebagai berikut :



- 1) Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Startegis kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 5 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Pembangunan TPA Persampahan Regional
 2. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Kab. Lebak
 3. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Kab. Pandeglang
 4. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Kab. Serang
 5. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Kota Serang
- 2) Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 1 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Updating Database Persampahan

Pagu Anggaran TA. 2019 untuk kegiatan ini adalah sebesar 15.559.000.000,00 (*Lima Belas Milyar Lima ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2019 nya adalah sebesar Rp. 4.462.875.694,00 (*Empat Milyar Empat Ratus EnamPuluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), terserap 28.68% dari pagu anggaran.

Adapun Indikator kinerja Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %) ini tidak tercapai dikarenakan adanya efisiensi belanja penggandaan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja jasa konsultasi survey, belanja jasa narasumber/instruktur. Sementara terdapat anggaran yang tidak digunakan yaitu Pekerjaan Pembangunan TPA Persampahan Regional (TPST Bojong Menteng) (bobot 70,70%), putus kontrak (force Majer) sehingga tidak diserap karena adanya penolakan pembangunan TPA persampahan dari warga setempat.

Dari ke 5 sub kegiatan tersebut diatas telah mencapai progress fisik sebesar 100%.



Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Persampahan di Kawasan Startegis ini dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini :

	
DESA SAWARNA TIMUR KEC. BAYAH KAB. LEBAK	
	
TPST DESA CIKANDE KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG	
	
DESA CIHARA KEC.CIHARA KAB. LEBAK	



b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakarya, meliputi sub kegiatan sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakarya kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 10 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Konsultansi Perencanaan Pembebasan Lahan Pembangunan Off Take Reservoir Jaringan Transmisi
2. Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Lahan Perluasan
3. Konsultan Individual Pendampingan Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B
4. Konsultan Individual Pendampingan Pengadaan Lahan Jalan Akses TPST Bojong Menteng
5. Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3P seluas 13.500 m²
6. Biaya Ukur, Pemeriksaan Tanah dan Sertifikasi oleh BPN
7. Biaya Operasional dan Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah (3%x10.800.000)
8. Pengadaan Lahan Jalan Akses TPST Bojong Menteng seluas 6.000 m²
9. Biaya Ukur, Pemeriksaan Tanah dan Sertifikasi oleh BPN
10. Biaya Operasional dan Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah (4%x1.500.000)

Pagu Anggaran TA. 2019 untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 15.116.319.290,00 (*Lima Belas Milyar Seratus Sebelas Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2019 nya adalah sebesar Rp. 6.975.507.672,00 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Lima Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), terserap 46.15% dari pagu anggaran.

Adapun Indikator kinerja Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %) ini tidak tercapai dikarenakan adanya efisiensi



Honorarium Tim Perencanaan/Persiapan Pengadaan Tanah, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Meja Kursi, Belanja Sewa Tenda, Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning (AC), Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Promosi dan Publikasi. Sementara terdapat anggaran yang tidak digunakan yaitu :

1. Pengadaan Lahan Jalan Akses TPST Bojong Menteng (135,500 m²),
2. Biaya Ukur
3. Pemeriksaan Tanah dan Sertifikasi oleh BPN
4. Biaya Operasional dan Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah (3 % X 108.000.000), tidak diserap karena pembangunan TPST tidak dilaksanakan.

Dari ke 5 sub kegiatan tersebut diatas telah mencapai progress fisik sebesar 100%.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakarya ini dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini :



	
	
	
	
Pengadaan Lahan Hunian Tetap	

- c. Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman, meliputi sub kegiatan sebagai berikut :



- 1) Perencanaan Bidang Infrastruktur Permukiman kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 51 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Konsultansi Perencanaan Pembebasan Lahan Pembangunan Off Take Reservoir Jaringan Transmisi
 2. Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B
 3. Jasa Konsultansi Individual Pengadaan Lahan
 4. Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3P seluas 13.500 m²
 5. Pengadaan Lahan Jalan Akses TPST Bojong Menteng seluas 6.000 m²
 6. Kajian Pembangunan Landmark & RTH Di Kawasan Strategis Provinsi Banten
 7. SID/DED Penataan Infastruktur Sarana Prasarana / Keciaptakaryaan Lainnya Pada Kawasan Strategis Provinsi
 8. Penyusunan SPM PUPR Bidang Keciaptakaryaan
 9. AMDAL/ UKL-UPL Sport Center
 10. AMDAL/ UKL-UPL WTP Sindang Heula
 11. AMDAL Banten Lama Skala Kota dan Kab. Serang
 12. Pengukuran Detail Desain Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Kab. Lebak
 13. Pengukuran Detail Desain Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Kab. Pandeglang
 14. Pengukuran Detail Desain Pemasangan Pipa Transmisi dan Distribusi Air Bersih IKK (Ibu Kota Kecamatan)
 15. Pengukuran Detail Desain Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Kab. Lebak Wilayah 1
 16. Pengukuran Detail Desain Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Kab. Lebak Wilayah II
 17. Pengukuran Detail Desain Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Kab. Lebak Wilayah III



18. Pengukuran Detail Desain Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Sawarna Wilayah I
19. Pengukuran Detail Desain Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Sawarna Wilayah II
20. Pengukuran Detail Desain Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Sawarna Wilayah III
21. Pengukuran Detail Desain Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Kab. Pandeglang Wilayah I
22. Pengukuran Detail Desain Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Kab. Pandeglang Wilayah II
23. Pengukuran Detail Desain Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Perkotaan Serang Cilegon Wilayah I
24. Pengukuran Detail Desain Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Perkotaan Serang Cilegon Wilayah II
25. Pengukuran Detail Desain Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Perkotaan Serang Cilegon Wilayah III
26. Pengukuran Detail Desain Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Perkotaan Serang Cilegon Wilayah IV
27. Perencanaan Penataan Interior Gedung PKK
28. Perencanaan Penataan Lingkungan Sekitar Kawasan KP3B
29. DED Kawasan Ciputri Banten Lama
30. DED Kawasan Kejati (Lanjutan)
31. Buku Induk Kriteria Design Kawasan Banten Lama (Wilayah Kota dan Kabupaten Serang)
32. Perencanaan Landscape GOR
33. Review Masterplan Kawasan Sportcenter
34. DED Penataan Kawasan Religi Cikadueun
35. DED Penataan Kawasan Religi Caringin
36. DED Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana Lainnya di Polda Banten



37. DED Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana Lainnya di Polda Banten Satker Brimob Polda Banten
 38. DED Jalan Akses TPST Bojong Menteng Tahap II
 39. DED Jembatan Jalan Akses TPST Bojong Menteng
 40. Identifikasi Dampak Sosial masyarakat Bojong Menteng
 41. Appraisal Dampak Sosial masyarakat Bojong Menteng
 42. Feasibility Study Rumah Jabatan Pimpinan
 43. DED intake WTP Sindang Heula
 44. Pengukuran Topologi Lahan Kebutuhan Infrastruktur Di Kec. Cipocok Jaya
 45. Pengukuran Topologi Lahan Kebutuhan Infrastruktur Di Kec. Curug
 46. Review DED Rumah Jabatan Pimpinan
 47. Site Plan Kawasan Perluasan KP3B
 48. DED Kawasan Wisata Gunung Luhur
 49. DED Perkuatan Jembatan Pipa IKK Kec. Maja
 50. DED Perkuatan Jembatan Pipa IKK Kec. Maja Kec. Ciligrang
 51. DED Penataan Lanskap Kawasan Gedung OPD Provinsi Banten Tahap II
- 2) Pembinaan Perencanaan Teknis Keciaptakaryaan kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 2 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Pembinaan Perencanaan Teknis Keciaptakarya-an
 2. Laporan Akhir Kompilasi Data Perencanaan Infrastruktur Permukiman
 - 3) Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan infrastruktur yang meliputi 55 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Pengawasan Pembangunan WTP Sindang Heula Dan Reservoir Pipa Distribusi Pabuaran
 2. Pengawasan Pembangunan TPST Bojong Menteng (Kab Serang)



3. Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre
4. Pengawasan Penataan Banten Lama (Tahap II)
5. Pengawasan Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar
6. Pengawasan Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar
7. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Sawarna Wilayah I
8. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Sawarna Wilayah II
9. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Sawarna Wilayah III
10. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Kab. Lebak Wilayah I
11. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Kab. Lebak Wilayah II
12. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Kab. Lebak Wilayah III
13. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Kab. Pandeglang Wilayah I
14. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Kab. Pandeglang Wilayah II
15. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Perkotaan Serang Cilegon Wilayah I
16. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Perkotaan Serang Cilegon Wilayah II
17. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Perkotaan Serang Cilegon Wilayah III
18. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Perkotaan Serang Cilegon Wilayah IV
19. Pengawasan Pemeliharaan Bumi Perkemahan Cikujang
20. Pengawasan Penataan Tugu Batas Provinsi



21. Pengawasan Pemeliharaan Guest House Padepokan Silat
22. Pengawasan Pembangunan Gedung PKK
23. Pengawasan Penataan Kawasan KOPASUS
24. Pengawasan Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana Lainnya di Kejati Banten
25. Pengawasan Pembangunan Gedung Dan Sarana Prasarana Lainnya di POLDA Banten
26. Pengawasan Penataan Landsekap Dan Penambahan Tribun GOR
27. Pengawasan Penataan Landsekap Gedung PKK
28. Pengawasan Penataan Interior Gedung PKK
29. Pengawasan Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Kab. Lebak
30. Pengawasan Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Kab. Pandeglang
31. Pengawasan Pemasangan Pipa Transmisi dan Distribusi Air Bersih IKK di Kab. Lebak
32. Pengawasan Penyediaan Air Minum di Kab. Serang
33. Pengawasan Penyediaan Air Minum di Kota Serang
34. Pengawasan Penyediaan Air Minum di Kab. Lebak
35. Pengawasan Penyediaan Air Minum di Kab. Pandeglang
36. Pengawasan Penyediaan Air Minum di Kab. Tangerang
37. Pengawasan Drainase Lingkungan di Kab. Lebak
38. Pengawasan Drainase Lingkungan di Kab. Serang
39. Pengawasan Drainase Lingkungan di Kab.
40. Pengawasan Pengelolaan Persampahan di Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang
41. Pengawasan Pengelolaan Persampahan di Kab. Serang dan Kota Serang
42. Konsultan Individual Pengawasan Peningkatan Rumah Dinas dan Aspal Wisma KOREM



43. Konsultan Individual Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan di Bojong Menteng
 44. Konsultan Individual Pengawasan Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Di kota serang dan Kab. Serang
 45. Konsultan Individual Pengawasan penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis Kab. Lebak
 46. Konsultan Individual Pengawasan penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis Kab. Pandeglang
 47. Konsultan Individual Pengawasan penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis Kab. Serang
 48. Konsultan Individual Pengawasan penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis Kab. Tangerang
 49. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis di Kec. Panggarangan, Kec. Cihara, Kec. Cilograng Kab. Lebak
 50. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis di Kec. Malimping dan Kec. Banjar Sari Kab. Lebak
 51. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis di Kec. Sajira dan Kec. Cipanas Kab. Lebak
 52. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis di Kec. Cigeulis, Kec. Panimbang, Kec. Sumur Kab. Pandeglang
 53. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Perkotaan di Kota Serang
 54. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Perkotaan di Kab. Serang
 55. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis di Kec. Jiput, Kec. Menes, Kec. Bojong, Kec, Cadasari Kab. Pandeglang
- 4) Pembinaan Pengawasan Teknis Infrastruktur, meliputi :



1. Pelatihan Pengawasan Uji Mutu Pekerjaan Beton pada Pekerjaan Infrastruktur Permukiman
2. Pembinaan Pengawasan Teknis Keciaptakaryaa-an
- 5) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Infrastruktr Permukiman
 1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Permukiman

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 22.243.352.480,00 (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat ratus Delapan Puluh Rupiah). Realisasi progres fisik adalah sebesar 76.65 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.800.491.420,00 (56,85%). Sisa anggaran sebesar Rp. 10.442.861.060,00 (46,95%) merupakan efisiensi Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Promosi dan Publikasi. Sementara terdapat anggaran yang tidak digunakan dikarenakan waktu pelaksanaan tidak cukup waktu, yaitu :

1. Kajian Pembangunan Landmark & RTH Di Kawasan Strategis Provinsi Banten
2. SID/DED Penataan Infrastruktur Sarana Prasarana Keciaptakaryaan Pada Kawasan Startegis
3. AMDAL/ UKL-UPL Sport Center
4. AMDAL/ UKL-UPL WTP Sindang Heula
5. AMDAL banten Lama Skala Kota dan Kab. Serang

Dari ke 5 sub kegiatan tersebut diatas telah mencapai progress fisik sebesar 100%.



3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pendukung

Dari kelima sasaran strategis tersebut terdapat 2 (Dua) sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja Pendukung yaitu Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur. dimana rincian dan analisis terhadap capaian sasaran strategis tersebut beserta indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1. Indikator kinerja Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)).
 - a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka terwujudnya opini audit BPK dengan target WTP tahun 2019
 - 1) Penyusunan Laporan Keuangan, kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pekerjaan keuangan yang meliputi 17 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Buku Catatan kegiatan Harian
 2. Kartu Catatan Kondisi Aset
 3. Kartu Kendali Aset
 4. Kertas continous form SPM
 5. Kertas continous form daftar gaji
 6. Kartu kendali kegiatan
 7. Buku pengawasan termin
 8. Buku Registrasi SPP
 9. Buku Registrasi SPM
 10. Buku Registrasi penolakan SPM
 11. Buku Registrasi Penerimaan SPJ
 12. Buku Registrasi penerimaan Bukti SPJ
 13. Buku registrasi SP2D
 14. Buku registrasi pengembalian (STS)



15. Buku regsitarsi kontrak
 16. Routing slip verifikasi dokumen pembayaran
 17. Buku daftar pinjaman dokumen
- 2) Penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP), kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pekerjaan keuangan yang meliputi 2 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Dokumen Draft hasil pemeriksaan
 2. Dokumen TLHP
- 3) Penyusunan Dokumen Laporan Pajak, kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pekerjaan keuangan yang meliputi 3 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Dokumen laporan pajak triwulanan
 2. Dokumen laporan SPJ administartif triwulanan
 3. Dokumen laporan SPJ fungsional triwulanan

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.169.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Sembilan Juta rupiah*). Terdapat 4 sub kegiatan dengan realisasi progres fisik adalah sebesar 100 % untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar Rp. 168.945.000,00 (99.97%). Sisa anggaran sebesar Rp. 55.000,00 merupakan efisiensi belanja Penggandaan.

b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun laporan hasil pekerjaan TA. 2019 diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan LPPD Prov. Banten Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2019
 2. Penyusunan LAKIP Prov. Banten Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2019



3. Penyusunan LKPJ Prov. Banten Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2019
- 2) Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan, kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pekerjaan PEP yang meliputi 7 pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Forum OPD bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman se-Provinsi Banten Tahun 2019
 2. Renja Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2019
 3. Fasilitasi penyusunan RKA-P/DPPA APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2019
 4. Fasilitasi penyusunan RKA-P/DPPA APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2019
 5. Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2019
 6. Rencana pengadaan Barang/Jasa (RUP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sumber dana APBD
 7. Rakor keterpaduan penyelenggaraan program dan anggaran bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- 3) Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian, kegiatan ini dilaksanakan untuk melaporkan hasil pekerjaan setiap awal bulan berjalan diantaranya sebagai berikut :
 1. Laporan bulanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sumber dana APBD
 2. Laporan bulanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sumber dana APBN
 3. Laporan evaluasi Renja triwulanan APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2019
 4. Laporan realisasi pengadaan barang/jasa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2019



5. Laporan akhir kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2019
- 4) Revisi RENSTRA DinasPerkim 2017-2022
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, kegiatan ini guna menunjang aktifitas pekerjaan diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 1. Bak Sampah Terbuka Mobil Mobil ARM Roll 6 m3
 2. Mobil Pengangkut Material (Hio 300 Dutro 130 HD 6,8 PS bak Drop Side Platform + Crane Kap 3 Ton Anti
 3. Mobil Toilet (long chasis - Super VIP)
 4. Motor Roda Dua (Motor Lapangan 150 cc/ 3 Unit)
 5. Motor Roda Dua (Motor Matic 125 cc/2 Unit)
 6. Motor Bentor (Motor sampah Roda 3, 200 cc) sebanyak 5 unit
 7. Floor Scrubbbber Machine (Krisbow - Ride On Scrubber Drier MR 85B CB) sebanyak 2 unit
 8. Mesin Pel lantai sebanyak 10 unit
 9. Mesin Potong rumput sebanyak 12 unit
 10. Manual Sweefer sebanyak 10 unit
 11. AC Central (Setara AC CASSETE Daikin Inverter 5 PK) berikut Pemasangan, Konstruksi dan Selang sebanyak 4 unit
 12. AC Central (Setara AC CASSETE Daikin Inverter 5 PK) berikut Pemasangan, Konstruksi dan Selang sebanyak 3 unit
 13. PC (setara Lenovo Ideacenter AIO (ORI) 520-221CB-OHID GRAY - Layar 22 inch, proc corei5-8400T, Ram sebanyak 10 unit
 14. Infocus Portebale (P6 Portable Mini DLP Smart Phone Wired Projector) sebanyak 5 unit
 15. Printer setara Epson L310 New sebanyak 5 unit
 16. Printer setara HP Laser Jet P1102W sebanyak 10 unit
 17. Scanner Epson DS 410 sebanyak 8 unit
 18. Radio Inverter (Frekwensi UHF dan VHF) sebanyak 1 unit
 19. Handy Talky sebanyak 15 buah



- 2) Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor
 1. Interior Ruang Arsip Dinas, Ruang Laktasi, Mushala, Ruang Transit Utama dan Transit Kadis
 2. Mebeleur Ruang Arsif Dinas dan Ruang Pantry Kadis
 3. Mebeleur Ruang Laktasi, Ruang Mushala, Ruang Transit Utama dan Ruang Transit Kadis
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - 1) Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
 1. Pemeliharaan Atap dan Plafond Gedung Kantor
 2. Pemeliharaan pengecatan Exterior Gedung Kantor
 3. Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal dan Penerangan Lampu Gedung Kantor
 4. Pemeliharaan Kamar Mandi Gedung Kantor
 5. Pemeliharaan Halaman Kantor
 6. Pemeliharaan Pintu Automatic
 7. Pemeliharaan jaringan Air Bersih dan Air kotor
 8. Pemeliharaan Penataan Taman Kantor
 9. Pemeliharaan Atap Gedung Kantor (Waterprofing)
 10. Pemeliharaan Canopy Parkiran Motor
 11. Pemeliharaan Pos Jaga Security
 12. Pemeliharaan Ralling Atap Gedung Kantor
 13. Pemeliharaan Jendela dan ACP Gedung Kantor
 14. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
 15. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK
- e. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
 - 1) Operasional Kantor tidak Tetap
 1. Premi Asuransi Kesehatan BPJS bagi Non PNS
 2. BPJS Ketenagakerjaan
 - 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing)
 1. Jasa Kebersihan Kantor



2. Upah Tenaga Kebersihan Taman, Bangunan Gedung KP3B, Kolam Retensi
3. Upah Tenaga Koordinator Kebersihan Taman, Bangunan Gedung KP3B, Kolam Retensi
4. Upah Tenaga mekanik workshop peralatan kebersihan KP3B
5. Upah Tenaga Ahli mekanikal elektrik KP3B Terpadu
6. Upah Pengemudi Operasional SKPD (Mobil Kebersihan KP3B)
7. Upah tenaga ahli Plumbing kebersihan KP3B Terpadu
8. Upah Tenaga keamanan gedung KP3B Terpadu
9. Jasa Kebersihan Gedung SKPD
10. Pemeliharaan Kebersihan KP3B
11. Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong (300 m³ x 12 bln) sebanyak 3.600 M³
- 3) Penyediaan Barang Pake Habis
 1. Belanja Alat Tulis Kantor
 2. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
 3. Belanja perangko, Materai dan Benda Pos
 4. Belanja Peralatan kebersihan dan Bahan pembersih
 5. Peralatan dan bahan penunjang pemeliharaan kebersihan KP3B
 6. Belanja peralatan kantor
- 4) Penyediaan Bahan Cetak
- 5) Penyediaan Makan dan Minum Kantor
- 6) Penyediaan Operasional Jasa Kantor
 1. Pengisian tabung pemadam kebakaran Tabung 3,5 Kg (15 unit)
 2. Bendera dan umbul2
 3. Telepon Kantor
 4. Listrik Kantor
 5. Listrik Gedung SKPD terpadu KP3B
 6. Listrik Taman, Bangunan Gedung KP3B, Kolam retensi
 7. Majalah



8. Surat Kabar
9. Pakaian Dinas dan atributnya
10. Pemeliharaan Kebersihan KP3B
- 7) Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo
 1. Pameran Display HUT Banten pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 2. Pameran Display Banten Expo pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 8) Penyediaan BBM
 1. Pameran Display HUT Banten pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 2. Pameran Display Banten Expo pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 3. Bahan Bakar Minyak/gas kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 3 (pertamax) (39 unit x 9bln x 36 ltr)
 4. Bahan Bakar Minyak/gas kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 3 (pertamax) (39 unit x 3bln x 36 ltr)
 5. Bahan Bakar Minyak/gas kendaraan Dinas Roda 4 Minibus (pertamax) (14 unit x 9bln x 120 ltr)
 6. Bahan Bakar Minyak/gas kendaraan Dinas Roda 4 Minibus (pertamax dex) (4 unit x 9bln x 120 ltr)
 7. Bahan Bakar Minyak/gas kendaraan Dinas Roda 4 Minibus (pertamax dex) (1 unit x 9bln x 137 ltr)
 8. Bahan Bakar Minyak/gas kendaraan Dinas Roda 4 Minibus (pertamax dex) (14 unit x 3bln x 120 ltr)
 9. Bahan Bakar Minyak/gas kendaraan Dinas Roda 4 Minibus (pertamina dex) (4 unit x 3bln x 120 ltr)
 10. Bahan Bakar Minyak/gas kendaraan Dinas Roda 4 Minibus (pertamina dex) (1 unit x 3bln x 137 ltr)
 11. Bahan Bakar Minyak/gas kendaraan Dinas Roda 6 (pertamina dex) (9 unit x 9 bln x 330 ltr)



12. Bahan Bakar Minyak/gas kendaraan Dinas Roda 6 (pertamina dex) (9 unit x 3 bln x 330 ltr)
 13. Bahan Bakar Minyak/gas mesin babad rumput (pertamax) (8 unit x 9 bln x 20 liter)
 14. Bahan Bakar Minyak/gas mesin babad rumput (pertamax) (8 unit x 3 bln x 20 liter)
 15. Bahan Bakar Minyak/gas mesin mesin genset (pertamax) (2 unit x 120 liter x 2 kali)
 16. Bahan Bakar Minyak/gas mesin genset (pertamina dex) (2 unit x 120 liter x 2 kali)
 17. Bahan Bakar Minyak/gas mesin genset (pertamax) (2 unit x 120 liter x 2 kali)
 18. Bahan Bakar Minyak/gas mesin genset (pertamina Dex) (2 unit x 120 liter x 2 kali)
 19. BBM Pertamina mesin potong rumput (15 unit x 20 liter x 9 bln)
 20. BBM Pertamina Motor Roda 3 (8 unit x 36 liter x 9 bln)
 21. BBM Pertamina DEX Mobil Sapu jalan road sweeper (2 unit x 330 liter x 9 bln)
 22. BBM Pertamina DEX Mobil Sampah (5 unit x 330 Ltr x 9 Bln)
 23. BBM Pertamina Mobil Roda 4 (1 unit x 120 liter x 9 bln)
 24. BBM Pertamina DEX Baby Roller (1 unit x 50 liter x 9 bln)
 25. BBM Pertamina DEX Mobil Sky Lift (1 unit x 330 liter x 9 bln)
 26. BBM Pertamina mesin potong rumput (15 unit x 20 liter x 3 bln)
 27. BBM Pertamina Motor Roda Tiga (8 unit x 36 Liter x 3 Bln)
 28. BBM Pertamina DEX Mobil sapu sampah (5 unit x 330 Ltr x 3 Bln)
 29. BBM Pertamina DEX Mobil Sampah (5 unit x 330 Ltr x 3 Bln)
 30. BBM Pertamina Mobil Roda 4 (1 unit x 120 liter x 3 bln)
 31. BBM Pertamina DEX Baby Roller (1 Unit x 50 Liter x 3 bln)
 32. BBM Pertamina DEX Mobil Sky Lift (1 unit x 330 liter x 3 bln)
- f. Peningkatan Kapasitas Aparatur



- 1) Fasilitas Administrasi Kepegawaian
 1. Cetak dan Penggandaan
- 2) Peningkatan Kompetensi Aparatur
 1. Bimtek SKP On Line
 2. Bimtek Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPKAD dan Inspektorat)
 3. Pembinaan Kepegawaian Aparatur Dinas (Inspektorat dan BKD)
 4. Pengiriman Kursus-kursus / pelatihan singkat
- g. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah
 - 1) Koordinator dan Konsultasi ke Dalam Daerah
 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab.Pandeglang
 2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Serang
 3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Cilegon
 4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab.Serang
 5. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab.Lebak
 6. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab/Kota Tangerang
 - 2) Koordinator dan Konsultasi ke Luar Daerah
 1. Perjalanan Dinas Luar Daerah
- h. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
 - 1) Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD
 1. Bimtek Pengelolaan Kearsipan
 - 2) Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD
 1. Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD
- i. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B
 1. Pemeliharaan Gedung Terpadu
 2. Pemeliharaan Bangunan KP3B
 3. Pemeliharaan Masjid Raya Albantani KP3B
 4. Pemeliharaan / Penataan Taman KP3B
 5. Pemeliharaan Jalan Lingkungan KP3B
 6. Pemeliharaan Bangunan Alun-alun Pancaniti



7. Pemeliharaan Kolam Retensi

j. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

1) Profil Kinerja Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

1. Penyusunan Buku Data dan informasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2019 WKP I

2. Penyusunan Buku Data dan informasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2019 WKP II

3. Penyusunan Buku Data dan informasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2019 WKP III

2) Visualisasi Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

1. Penyusunan Visualisasi Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2019

2. Penyusunan Visualisasi Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2019

3) Bahan Statistik Sektor dan Informasi Geospasial Tematik Tahun 2019

1. Bahan Informasi Geospasial Tematik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

2. Bahan Statistik Sektor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Media Informasi Tahun 2019

1. Jasa Bantuan Hukum Non Ligitasi

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 640.000.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*), sampai dengan Desember 2019 realisasi progres fisik adalah sebesar 97.78% dan realisasi keuangan



sebesar Rp. 607.725.000,00 (97.39%). Dari 4 tolok ukur telah terlaksana semuanya, namun terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 16.275.000,00 merupakan efisiensi penggandaan, Efisiensi sisa anggaran diantaranya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Uang Saku, Belanja Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli.



Tabel 3.13 Rekapitulasi paket/tolok ukur yang tidak dilaksanakan pada

3.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.17 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2019

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan			Selisih	Permasalahan	Solusi
			(Rp.)	%	Fisik %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) - (4)	(8)	(9)
	BELANJA DAERAH	582,287,411,000.00	438,496,389,875.94	75.31	169.70	143,791,021,124.06		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17,675,000,000.00	15,920,452,875.00	90.07	90.07	1,754,547,125.00		
	Belanja Tidak Langsung	17,675,000,000.00	15,920,452,875.00	90.07	90.07	1,754,547,125.00	Anggaran tidak digunakan dan dianggarkan kembali pada TA. 2020 : 1. Belanja tunjangan fungsional. 2. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja beserta PPh (Arsiparis (2 orang x 12 bulan))	Dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	BELANJA LANGSUNG	564,612,411,000.00	422,575,937,000.94	74.84	79.63	142,036,473,999.06		
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	40,333,236,000.00	34,567,825,503.00	85.71	96.58	5,765,410,497.00		
	1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	169,000,000.00	168,945,000.00	99.97	100.00	55,000.00		
	2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,040,396,000.00	935,193,300.00	89.89	100.00	105,202,700.00	Efesiensi sisa anggaran Belanja Penggandaan	
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	4,399,000,000.00	2,550,140,151.00	57.97	68.65	1,848,859,849.00	Efesiensi sisa Anggaran : 1. Belanja Jasa Konsultan Manajemen 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5. Belanja Konsultan Perencanaan 6. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 7. Belanja Jasa Tenaga Ahli 8. Belanja Penggandaan	Tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2020
	4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	3,141,000,000.00	2,643,166,300.00	84.15	100.00	497,833,700.00	Efesiensi sisa Anggaran : 1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan 4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih Pembersih 6. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Pendingin 7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	



							Personal Komputer 8. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 9. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF 10. Belanja Barang Non Kapitalisasi Anggaran tidak digunakan : 1. Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan pemeliharaan lapangan (Mobil Pengangkut Material (Hio 300 Dutro 130 HD 6,8 PS bak Drop Side Platform + Crane Kap 3 Ton)) sebesar Rp. 800,000,000, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi 2. Belanja modal peralatan mesin-pengadaan kendaraan bermotor khusus (Mobil Toilet (Long Chasis - Super VVIP)) sebesar Rp. 850,000,000, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi 3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih Pembersih (Manual Sweefer sebanyak 10 unit x Rp. 7.000.000) sebesar Rp. 70.000.000, dikarenakan barangnya Inden sampai Tahun 2020	
	5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	15,230,853,000.00	13,368,893,734.00	87.78	100.00	1,861,959,266.00	Efisiensi sisa anggaran : 1. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 2. Belanja Jasa Service 3. Belanja Penggantian Suku Cadang 4. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB 5. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 6. Belanja Pemeliharaan Alat Studio	



	6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	154,000,000.00	100,378,600.00	65.18	100.00	53,621,400.00	Efisiensi sisa anggaran : 1. Belanja Kebersihan 2. Belanja Alat Tulis Kantor 3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4. Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 5. Belanja Cetak 6. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7. Belanja Telepon/Faksimili/Internet 8. Belanja Surat Kabar/Majalah 9. Belanja Listrik 10. Belanja Jasa TV Cable 11. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 12. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 13. Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) 14. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 15. Belanja Jasa Pendampingan 16. Belanja Jasa Operator/Admonistrasi/Teknis, dikarenakan adanya operator yang mengundurkan diri 17. Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan Anggaran tidak digunakan : 1. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, dikarenakan 1 (satu) orang pegawai telah meninggal 2. Belanja Premi Asuransi Kesehatan, dikarenakan adanya 1 orang TKS telah meninggal 3. Belanja Cetak, Belanja Sewa Tenda, Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Pendampingan dan Belanja Dokumentasi), belanja tersebut untuk kegiatan Banten Expo, namun tidak jadi dilaksanakan	Dilakukan pengurangan belanja pengiriman kursus-kursus pelatihan pada TA. 2020
--	---	--------------------------------	----------------	----------------	-------	--------	---------------	--	--



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	7	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah	280,000,000.00	197,781,618.00	70.64	100.00	82,218,382.00	Efesiensi sisa anggaran : 1. Belanja Penggandaan 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4. Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 5. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 6. Belanja Jasa Tenaga Ahli 7. Belanja Dokumentasi 8. Belanja Promosi dan Publikasi Anggaran tidak digunakan : Belanja Pengiriman Kursus-kursus Pelatihan Singkat/Pelatihan pada Aparatur Dinas hanya terlaksana 50%, hal tersebut dikarenakan adanya kursus-kursus pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Banten, untuk TA. 2020 dilakukan pengurangan	
	8	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	134,000,000.00	81,710,000.00	60.98	100.00	52,290,000.00	Efesiensi sisa anggaran : 1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B	15,160,987,000.00	13,913,891,800.00	91.77	100.00	1,247,095,200.00	Efesiensi sisa anggaran : 1. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 2. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota 3. Belanja Pemeliharaan Jalan 4. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air 5. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Anggaran tidak digunakan : 1. SOP Pemeliharaan (kebersihan, Taman dan Sarana Bangunan Penunjang), Kawasan Banten Lama TA. 2020, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi dan tidak dianggarkan kembali TA. 2020 2. SOP Pemeliharaan (Kebersihan, taman dan sarana bangunan penunjang), kawasan KP3B TA. 2020 dan Sertifikasi Uji Kelayakan Lift SKPD Terpadu tidak diserap, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi dan tidak dianggarkan kembali TA. 2020	Tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2020
10	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	624,000,000.00	607,725,000.00	97.39	100.00	16,275,000.00	Efesiensi sisa anggaran : 1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3. Belanja Uang Saku 4. Belanja Narasumber/Instruktur 5. Belanja Jasa Tenaga Ahli	
2	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	144,395,822,086.00	130,672,693,207.94	90.50	99.48	13,723,128,878.06		
11	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	41,842,774,000.00	41,029,691,167.94	98.06	100.00	813,082,832.06	Efesiensi sisa anggaran : 1. Belanja Penggandaan 2. Belanja Sewa Meja Kursi 3. Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning (AC) 4. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6. Sisa Kontrak Belanja Sarana dan Prasarana	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



							Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 7. Pengurangan PHO	
12	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	4,689,261,250.00	3,938,613,720.00	83.99	100.00	750,647,530.00	Efisiensi sisa anggaran : 1. Belanja Penggandaan 2. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 5. Uang Saku 6. Sisa Kontrak belanja jasa konsultasi perencanaan 7. Sisa kontrak belanja jasa konsultasi pengawasan	
13	Penatagunaan Kawasan Permukiman	2,110,588,000.00	2,008,040,300.00	95.14	100.00	102,547,700.00	Efisiensi sisa anggaran : 1. Belanja Penggandaan 2. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5. Belanja Jasa Tenaga Ahli 6. Belanja Dokumentasi 7. Sisa kontrak belanja jasa knsultasi software aplikasi 8. Sisai kontrak belanja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
14	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	47,085,035,136.00	45,572,746,504.00	96.79	100.00	1,512,288,632.00	Efisiensi sisa anggaran : 1. Belanja Sewa Meja Kursi 2. Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning (AC) 3. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5. Uang Saku 6. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 7. Belanja Jasa Tenaga Ahli 8. Belanja Promosi dan Publikasi 9. Pengurangan PHO Sisa Kontrak :	Dilakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



							1. Belanja Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2. Bahan Baku Bangunan 3. Belanja Modal Gedung dan Bnagunan- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat	
15	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	6,481,403,700.00	6,227,561,567.00	96.08	99.03	253,842,133.00	Efisiensi sisa anggaran : 1. Belanja Penggandaan 2. Belanja Sewa Alat Kerja Lapangan 3. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 6. Belanja Jasa Tenaga Ahli 7. Belanja Jasa Pendampingan 8. Belanja Promosi dan Publikasi 9. Belanja Dokumentasi 10. Sisa Kontrak Anggaran tidak digunakan : Pekerjaan Pengawasan Bantuan PSU tidak diserap, dikarenakan fisiknya tidak dilaksanakan	
16	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	2,299,260,000.00	1,160,867,000.00	50.49	69.83	1,138,393,000.00	Efisiensi sisa anggaran : 1. Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia 2. Belanja Penggandaan 3. Belanja Sewa Meja Kursi 4. Belanja Sewa Tenda 5. Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning (AC) 6. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8. Uang Saku 9. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 10. Belanja Jasa Tenaga Ahli 11. Sisa Kontrak 11. Belanja Promosi dan Publikasi Anggaran tidak digunakan : Belanja Sarana dan Prasarana Perumahan	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



							Rakyat dan Kawasan Permukiman (Jalan Lingkungan) di Kawasan Huntap tidak dilaksanakan, dikarenakan tidak cukup waktu (baru selesai pembebasannya)	
	17 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	39,887,500,000.00	30,735,172,949.00	77.05	100.00	9,152,327,051.00	Efisiensi sisa anggaran : 1. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 4. Belanja Jasa Tenaga Ahli 5. Belanja Jasa Pendampingan 6. Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 7. Sisa Kontrak	
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	260,449,601,144.00	168,238,254,978.00	64.60	64.63	92,211,346,166.00		
	18 Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	4,955,554,844.00	4,445,822,724.00	89.71	100.00	509,732,120.00	Efisiensi sisa anggaran : 1. Belanja Listrik 2. Belanja Penggandaan 3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5. Sisa Kontrak	Dilakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan
	19 Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	121,039,171,300.00	111,800,420,435.00	92.37	90.67	9,238,750,865.00	Efisiensi sisa anggaran : 1. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2. Belanja Listrik 3. Belanja Penggandaan 4. Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan 5. Uang Saku 6. Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan 7. Belanja Jasa Narasumber/ Instruktur 8. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9. Sisa Kontrak	Dilakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



							10. Pengurangan PHO 11. Pekerjaan Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar (progres fisik 92,06 %) terlambat dalam pengerjaan dikarenakan diawal terdapat keterlambatan proses lelang dan adanya aksi warga terkait lahan sekitar gedung OPD sehingga menyebabkan pekerjaan terlambat (finishing dan lanscape).	
20	Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi	134,454,875,000.00	51,992,011,819.00	38.67	39.89	82,462,863,181.00	Efesiensi sisa anggaran : 1. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2. Belanja Bahan Bakar Minyak/gas 3. Belanja Listrik 4. Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan 5. Uang Makan Tambahan (Extra Fooding) 6. Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan 7. Belanja Penggandaan 8. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9. Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 10. Uang Saku 11. Belanja Jasa Narasumber/ Instruktur 12. Belanja Jasa Tenaga Ahli 13. Belanja Promosi dan Publikasi 14. Belanja Sewa Meja Kursi 15. Belanja Sewa Tenda 16. Sisa Kontrak 17. Pengurangan PHO Anggaran tidak digunakan : Pekerjaan Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre (Multiyears) belum dilaksanakan pada TA. 2019, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi dan akan dilanjutkan pada TA. 2020	
4	Program Keciaptakaryaan	119,433,751,770.00	89,097,163,312.00	74.60	82.64	30,336,588,458.00		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



21	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	69,045,000,000.00	61,348,981,533.00	88.85	93.09	7,696,018,467.00	Efesiensi sisa anggaran : 1. Belanja Penggandaan 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 4. Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan 5. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6. Belanja Jasa Konsultansi Survey 7. Belanja Telepon/Faksimili/Internet 8. Belanja Listrik 9. Sisa Kontrak Anggaran tidak digunakan : 1. Pekerjaan pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Desa Sukamanah Kec. Menes kab. Pamdeglang tidak diserap, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi 2. Pekerjaan Pembangunan WTP Sindang Heula + Reservoir Pipa Distribusi (92.53%) yang belum selesai pekerjaan Adanya keterlambatan pengiriman alat penunjang WTP, sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan finishing pada WTP, reservoir dan pembuatan jalan beton	Dianggarkan kembali pada TA. 2020
22	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	4,909,000,000.00	4,509,306,993.00	91.86	100.00	399,693,007.00	Efesiensi sisa anggaran : 1. Belanja Penggandaan 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3. Belanja Jasa Konsultansi Survey	
23	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciatakaryaan	15,116,319,290.00	6,975,507,672.00	46.15	82.90	8,140,811,618.00	Efesiensi sisa anggaran : 1. Honorarium Tim Perencanaan /Persiapan Pengadaan Tanah 2. Belanja Penggandaan 3. Belanja Sewa Meja Kursi 4. Belanja Sewa Tenda 5. Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning (AC) 6. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



							8. Uang Saku 9. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 10. Belanja Jasa Tenaga Ahli 11. Belanja Promosi dan Publikasi 12. Sisa Kontrak 13 Pengurangan PHO Anggaran tidak digunakan : 1. Pengadaan Lahan Jalan Akses TPST Bojong Menteng (135,500 m2), 2. Biaya Ukur, 3. Pemeriksaan Tranah dan Sertifikasi oleh BPN, 4. Biaya Operasional dan Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah (3 % X 108.000.000), tidak diserap karena pembangunan TPST tidak dilaksanakan	
24	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	15,559,000,000.00	4,462,875,694.00	28.68	36.23	11,096,124,306.00	Efsiensi sisa anggaran : 1. Belanja Penggandaan 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3. Belanja Jasa Konsultansi Survey 4. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Anggaran tidak digunakan : Pekerjaan Pembangunan TPA Persampahan Regional (TPST Bojong Menteng) (bobot 70,70%), putus kontrak (force Majer) sehingga tidak diserap karena adanya penolakan pembangunan TPST Bojong Menteng dari warga setempat	Dilakukan kajian TPA Persampahan Regional
25	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	14,804,432,480.00	11,800,491,420.00	79.71	76.65	3,003,941,060.00	Efesiensi sisa anggaran : 1. Belanja Penggandaan 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5. Uang Saku 6. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur 7. Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia	



							8. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9. Belanja Jasa Tenaga Ahli 10. Belanja Promosi dan Publikasi Anggaran tidak digunakan : Pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi : 1. Kajian Pembangunan Landmark & RTH Di Kawasan Strategis Provinsi Banten 2. SID/DED Penataan Infrastruktur Sarana Prasarana Keciptakaryaana Pada Kawasan Startegis 3. AMDAL/ UKL-UPL Sport Center 4. AMDAL/ UKL-UPL WTP Sindang Heula 5. AMDAL banten Lama Skala Kota dan Kab. Serang	
JUMLAH BELANJA DAERAH		582,287,411,000.00	438,496,389,875.94	75.31	79.95	143,791,021,124.06		



Akuntabilitas Keuangan

3.4.1 Akuntabilitas Keuangan Sasaran/Program Strategis

Realisasi keuangan tiap sasaran/program strategis masing-masing indiaktor kinerja dapat dilihat pada table 3.18 sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan			Selisish
			(Rp.)	(%)	Fisik	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) - (4)
	BELANJA DAERAH	582,287,411,000.00	438,496,389,875.94	75.31	73.21	143,791,021,124.06
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17,675,000,000.00	15,920,452,875.00	90.07	81.13	1,754,547,125.00
	Belanja Tidak Langsung	17,675,000,000.00	15,920,452,875.00	90.07	90.07	1,754,547,125.00
	BELANJA LANGSUNG	564,612,411,000.00	422,575,937,000.94	74.84	65.29	142,036,473,999.06
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	40,333,236,000.00	34,567,825,503.00	85.71	83.72	5,765,410,497.00
	1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	169,000,000.00	168,945,000.00	99.97	100.00	55,000.00
	2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,040,396,000.00	935,193,300.00	89.89	100.00	105,202,700.00
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	4,399,000,000.00	2,550,140,151.00	57.97	68.65	1,848,859,849.00
	4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	3,141,000,000.00	2,643,166,300.00	84.15	100.00	497,833,700.00
	5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	15,230,853,000.00	13,368,893,734.00	87.78	100.00	1,861,959,266.00
	6 Peningkatan Kapasitas Aparatur	154,000,000.00	100,378,600.00	65.18	100.00	53,621,400.00
	7 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah	280,000,000.00	197,781,618.00	70.64	100.00	82,218,382.00
	8 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	134,000,000.00	81,710,000.00	60.98	100.00	52,290,000.00



	9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B	15,160,987,000.00	13,913,891,800.00	91.77	100.00	1,247,095,200.00
	10	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	624,000,000.00	607,725,000.00	97.39	100.00	16,275,000.00
2		Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	144,395,822,086.00	130,672,693,207.94	90.50	90.21	13,723,128,878.06
	11	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	41,842,774,000.00	41,029,691,167.94	98.06	100.00	813,082,832.06
	12	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	4,689,261,250.00	3,938,613,720.00	83.99	100.00	750,647,530.00
	13	Penatagunaan Kawasan Permukiman	2,110,588,000.00	2,008,040,300.00	95.14	100.00	102,547,700.00
	14	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	47,085,035,136.00	45,572,746,504.00	96.79	100.00	1,512,288,632.00
	15	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	6,481,403,700.00	6,227,561,567.00	96.08	99.03	253,842,133.00
	16	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	2,299,260,000.00	1,160,867,000.00	50.49	69.83	1,138,393,000.00
	17	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	39,887,500,000.00	30,735,172,949.00	77.05	100.00	9,152,327,051.00
3		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	260,449,601,144.00	168,238,254,978.00	64.60	48.59	92,211,346,166.00
	18	Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	4,955,554,844.00	4,445,822,724.00	89.71	100.00	509,732,120.00
	19	Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	121,039,171,300.00	111,800,420,435.00	92.37	90.67	9,238,750,865.00
	20	Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi	134,454,875,000.00	51,992,011,819.00	38.67	39.89	82,462,863,181.00
4		Program Keciptakarya	119,433,751,770.00	89,097,163,312.00	74.60	65.36	30,336,588,458.00
	21	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	69,045,000,000.00	61,348,981,533.00	88.85	93.09	7,696,018,467.00
	22	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	4,909,000,000.00	4,509,306,993.00	91.86	100.00	399,693,007.00



23	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	15,116,319,290.00	6,975,507,672.00	46.15	82.90	8,140,811,618.00
24	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	15,559,000,000.00	4,462,875,694.00	28.68	36.23	11,096,124,306.00
25	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	14,804,432,480.00	11,800,491,420.00	79.71	76.65	3,003,941,060.00
JUMLAH BELANJA DAERAH		582,287,411,000.00	438,496,389,875.94	75.31	79.68	143,791,021,124.06

Realisasi Belanja untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati bersama, secara keseluruhan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun anggaran 2019 mengalokasikan dana kegiatan sebesar Rp. 582.287.411.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) yang terdiri dari :

- 1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 17.675.000.000,00
- 2. Belanja Langsung sebesar Rp. 564.612.411.000,00

Dalam pelaksanaannya sampai dengan Desember 2019, alokasi belanja tersebut terserap sebesar Rp. 438.496.389.875,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Delaan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) atau mencapai 75,31% dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.920.452.875,00
- 2. Belanja Langsung sebesar Rp. 422.575.937.000,00

Adapun rincian lebih lanjut anggaran dan realisasinya dapat dilihat ditabel sebagai berikut :



TABEL 3.19 RINCIAN BELANJA TARGET KINERJA DAN REALISASI KINERJA TA. 2019

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran DPPA Tahun 2019		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019		Prosentase Akhir Realisasi Keuangan dan Fisik		
		Satuan	Rp.	Satuan	Rp	Fisik	Keuangan	Sisa Anggaran
						(%)	(%)	(Rp.)
	BELANJA DAERAH		582,287,411,000.00		438,496,389,875.94	79.68	75.31	143,791,021,124.06
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		17,675,000,000.00		15,920,452,875.00	81.13	90.07	1,754,547,125.00
	Belanja Tidak Langsung		17,675,000,000.00		15,920,452,875.00	90.07	90.07	1,754,547,125.00
	BELANJA LANGSUNG		564,612,411,000.00		422,575,937,000.94	65.29	74.84	142,036,473,999.06
1	Program Tata Kelola Pemerintahan		40,333,236,000.00		34,567,825,503.00	83.72	85.71	5,765,410,497.00
	1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	20%	169,000,000.00	20%	168,945,000.00	100.00	99.97	55,000.00
	2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	20%	1,040,396,000.00	20%	935,193,300.00	100.00	89.89	105,202,700.00
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	20%	4,399,000,000.00	20%	2,550,140,151.00	68.65	57.97	1,848,859,849.00
	4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	20%	3,141,000,000.00	20%	2,643,166,300.00	100.00	84.15	497,833,700.00
	5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	20%	15,230,853,000.00	20%	13,368,893,734.00	100.00	87.78	1,861,959,266.00
	6 Peningkatan Kapasitas Aparatur	20%	154,000,000.00	20%	100,378,600.00	100.00	65.18	53,621,400.00
	7 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah	20%	280,000,000.00	20%	197,781,618.00	100.00	70.64	82,218,382.00



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



	8	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	20%	134,000,000.00	20%	81,710,000.00	100.00	60.98	52,290,000.00
	9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B	20%	15,160,987,000.00	20%	13,913,891,800.00	100.00	91.77	1,247,095,200.00
	10	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	20%	624,000,000.00	20%	607,725,000.00	100.00	97.39	16,275,000.00
2	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan			144,395,822,086.00		130,672,693,207.94	90.21	90.50	13,723,128,878.06
	11	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	42 Ha	41,842,774,000.00	42 Ha	41,029,691,167.94	100.00	98.06	813,082,832.06
	12	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	20 Dok	4,689,261,250.00	50 Dok	3,938,613,720.00	100.00	83.99	750,647,530.00
	13	Penatagunaan Kawasan Permukiman	20%	2,110,588,000.00	20%	2,008,040,300.00	100.00	95.14	102,547,700.00
	14	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	150 Unit	47,085,035,136.00	193 Unit	45,572,746,504.00	100.00	96.79	1,512,288,632.00
	15	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	70 Dok	6,481,403,700.00	126 Dok	6,227,561,567.00	99.03	96.08	253,842,133.00
	16	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	20%	2,299,260,000.00	20%	1,160,867,000.00	69.83	50.49	1,138,393,000.00
	17	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	49.000 M2	39,887,500,000.00	172.000 M2	30,735,172,949.00	100.00	77.05	9,152,327,051.00
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan			260,449,601,144.00		168,238,254,978.00	48.59	64.60	92,211,346,166.00
	18	Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	8 Kab/Kota	4,955,554,844.00	4 Kab/Kota	4,445,822,724.00	100.00	89.71	509,732,120.00
	19	Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	7 Gedung	121,039,171,300.00	5 Gedung	111,800,420,435.00	90.67	92.37	9,238,750,865.00
	20	Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi	3 Kawasan	134,454,875,000.00	3 Kawasan	51,992,011,819.00	39.89	38.67	82,462,863,181.00
4	Program Keciaptakaryaan			119,433,751,770.00		89,097,163,312.00	65.36	74.60	30,336,588,458.00



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



21	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	43.89 lt/dt	69,045,000,000.00	0.59 lt/dt	61,348,981,533.00	93.09	88.85	7,696,018,467.00
22	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	2300 KK	4,909,000,000.00	2300 KK	4,509,306,993.00	100.00	91.86	399,693,007.00
23	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	17.300 M2	15,116,319,290.00	19.500 M2	6,975,507,672.00	82.90	46.15	8,140,811,618.00
24	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	71.330 Jiwa	15,559,000,000.00	158.025 Jiwa	4,462,875,694.00	36.23	28.68	11,096,124,306.00
25	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	74 Dok	14,804,432,480.00	75 Dok	11,800,491,420.00	76.65	79.71	3,003,941,060.00



**TABEL 3.20 REALISASI ANGGARAN SASARAN/PROGRAM SASARAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Program/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		
					(Rp.)		Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))		40,333,236,000.00	34,567,825,503.00	85.71	0.00
			1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	169,000,000.00	168,945,000.00	99.97	100.00
			2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,040,396,000.00	935,193,300.00	89.89	100.00
			3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	4,399,000,000.00	2,550,140,151.00	57.97	68.65
			4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	3,141,000,000.00	2,643,166,300.00	84.15	100.00
			5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	15,230,853,000.00	13,368,893,734.00	87.78	100.00
			6 Peningkatan Kapasitas Aparatur	154,000,000.00	100,378,600.00	65.18	100.00
			7 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah	280,000,000.00	197,781,618.00	70.64	100.00
			8 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	134,000,000.00	81,710,000.00	60.98	100.00



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



			9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B	15,160,987,000.00	13,913,891,800.00	91.77	100.00
			10 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	624,000,000.00	607,725,000.00	97.39	100.00
2	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan			144,395,822,086.00	130,672,693,207.94	90.50	96.11
		Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)		48,642,623,250.00	46,976,345,187.94	96.57	100.00
			1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	41,842,774,000.00	41,029,691,167.94	98.06	100.00
			2 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	4,689,261,250.00	3,938,613,720.00	83.99	100.00
			3 Penatagunaan Kawasan Permukiman	2,110,588,000.00	2,008,040,300.00	95.14	100.00
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)		95,753,198,836.00	83,696,348,020.00	87.41	92.22
			1 Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	47,085,035,136.00	45,572,746,504.00	96.79	100.00
			2 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	6,481,403,700.00	6,227,561,567.00	96.08	99.03
			3 Penatagunaan Pengembangan Perumahan	2,299,260,000.00	1,160,867,000.00	50.49	69.83



			4 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	39,887,500,000.00	30,735,172,949.00	77.05	100.00
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan			260,449,601,144.00	168,238,254,978.00	64.60	80.31
		persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)		139,410,429,844.00	56,437,834,543.00	40.48	69.95
			1 Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi	134,454,875,000.00	51,992,011,819.00	38.67	39.89
			2 Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	4,955,554,844.00	4,445,822,724.00	89.71	100.00
		persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)		121,039,171,300.00	111,800,420,435.00	92.37	90.67
			1 Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	121,039,171,300.00	111,800,420,435.00	92.37	90.67
4	Program Keciaptakaryaan			119,433,751,770.00	89,097,163,312.00	74.60	70.17
		Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)		69,045,000,000.00	61,348,981,533.00	88.85	93.09
			1 Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	69,045,000,000.00	61,348,981,533.00	88.85	93.09
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)		20,025,319,290.00	11,484,814,665.00	57.35	60.97
			2 Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	4,909,000,000.00	4,509,306,993.00	91.86	100.00



			3 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan	15,116,319,290.00	6,975,507,672.00	46.15	82.90
		Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)		30,363,432,480.00	16,263,367,114.00	53.56	56.44
			1 Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	15,559,000,000.00	4,462,875,694.00	28.68	36.23
			2 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	14,804,432,480.00	11,800,491,420.00	79.71	76.65
			JUMLAH	564,612,411,000.00	422,575,937,000.94	74.84	79.68



1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hanya belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tambahan penghasilan. Realisasi Belanja pegawai TA 2019 adalah sebesar Rp. 15.920.452.875,00 atau 90,07% dari anggaran sebesar Rp. 17.675.000.000,00 terdiri dari Gaji dan Tunjangan realisasi sebesar Rp. 15.920.452.875,00 dari anggaran Rp. 17.675.000.000,00

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis Belanja Langsung terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran Honorarium/Upah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Realisasi belanja pegawai TA. 2019 sebesar Rp. 3.435.957.969,00 Atau 98,08% dari anggaran sebesar Rp. 3.369.953.200,00 terdiri dari:

- a. Honor PNS Realisasi belanja pegawai T.A 2019 sebesar Rp. 3.024.153.200,00
- b. Honor Non PNS Realisasi belanja pegawai T.A 2019 sebesar Rp. 345.800.000,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2019 Sebesar Rp. 63.475.028.122,00 atau 89,41% dari anggaran sebesar Rp. 70.996.636.310,00 terdiri dari:

- a. Belanja Pakai Habis Realisainya sebesar Rp. 2.124.346.004,00 atau 92,32% dari anggran sebesar Rp. 2.301.069.300,00



- b. Belanja Bahan/Material Realisasinya sebesar Rp. 2.858.860.837,00 atau 95.21% dari anggaran sebesar Rp. 3.002.635.136,00
- c. Belanja Jasa Kantor Realisasinya sebesar Rp. 6.042.937.034,00 atau 81.42% dari anggaran sebesar Rp. 7.422.086.700,00
- d. Belanja Premi Asuransi Realisasinya sebesar Rp. 198.354.180,00 atau 64.69% dari anggaran sebesar Rp. 306.636.000,00
- e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor realisasinya sebesar Rp. 2.631.757.050,00 atau 75.45% dari anggaran sebesar Rp. 3.488.037.500,00
- f. Belanja Cetak dan Penggandaan realisasinya sebesar Rp. 2.130.413.600,00 atau 88.60% dari anggaran sebesar Rp. 2.404.495.654,00
- g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat realisasinya sebesar Rp. 105.061.400,00 atau 99.44% dari anggaran sebesar Rp. 105.653.000,00
- h. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor realisasinya sebesar Rp. 160.175.750,00 atau 56.76% dari anggaran sebesar Rp. 282.231.400,00
- i. Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Kerja Lapangan realisasinya sebesar Rp. 34.500.000,00 atau 76.67% dari anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00
- j. Belanja Makanan dan Minuman realisasinya sebesar Rp. 942.779.000,00 atau 86.40% dari anggaran sebesar Rp. 1.091.120.000,00
- k. Belanja Pakaian dinas dan Atributnya realisasinya sebesar Rp. 121.520.000,00 atau 96.94% dari anggaran sebesar Rp. 125.350.000,00
- l. Belanja Pakaian Kerja Lapangan realisasinya sebesar Rp. 258.700.000,00 atau 93.14% dari anggaran sebesar Rp. 277.760.000,00



- m. Belanja Perjalanan Dinas realisasinya sebesar Rp. 1.642.678.078,00 atau 64.90% dari anggaran sebesar Rp. 2.530.960.000,00
- n. Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS realisasinya sebesar Rp. 0 atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00
- o. Belanja Pemeliharaan realisasinya sebesar Rp. 14.841.597.964,00 atau 93.26% dari anggaran sebesar Rp. 15.914.402.000,00
- p. Belanja Jasa Konsultansi realisasinya sebesar Rp. 23.480.430.040,00 atau 85.58% dari anggaran sebesar Rp. 27.437.428.130,00
- q. Uang Saku dan Uang Makan realisasinya sebesar Rp. 4.143.850.000,00 atau 86.96% dari anggaran sebesar Rp. 4.765.300.000,00
- r. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli Pendampingan realisasinya sebesar Rp. 2.999.850.000,00 atau 70.46% dari anggaran sebesar Rp. 4.257.600.000,00
- s. Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas realisasinya sebesar Rp. 4.420.600.000,00 atau 95.03% dari anggaran sebesar Rp. 4.651.950.000,00
- t. Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat realisasinya sebesar Rp. 75.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00
- u. Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi realisasinya sebesar Rp. 69.308.600,00 atau 84.40% dari anggaran sebesar Rp. 82.117.600,00
- v. Belanja Barang Non Kapitalis realisasinya sebesar Rp. 98.002.000,00 atau 98.00% dari anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00



- w. Belanja Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman realisasinya sebesar Rp. 176.227.414.837,94 atau 88.43% dari anggaran sebesar Rp. 199.275.150.358,00
- 3) Belanja Hibah
- a. Belanja Hibah Barang/Jasa kepada Pemerintah Pusat realisasinya sebesar Rp. 9.586.545.000,00 atau 99.89% dari anggaran sebesar Rp. 9.597.371.000,00
- 4) Belanja Modal
- a. Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung realisasinya sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp. 2.490.976.290,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu realisasinya sebesar Rp. 498.664.000,00 atau 36.99% dari anggaran sebesar Rp. 1.348.000.000,00
- c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor realisasinya sebesar Rp. 285.609.600,00 atau 24.96% dari anggaran sebesar Rp. 1.144.542.000,00
- d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga realisasinya sebesar Rp. 1.168.200.551,00 atau 91.40% dari anggaran Rp. 1.278.130.000,00
- e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer realisasinya sebesar Rp. 303.050.000,00 atau 99.76% dari anggaran Rp. 303.773.000,00
- f. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi realisasinya sebesar Rp. 178.759.000,00 atau 99.31% dari anggaran Rp. 180.000.000,00
- g. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja realisasinya sebesar Rp. 110.301.057.585,00 atau 99.31% dari anggaran Rp. 199.102.337.990,00



- h. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal realisasinya sebesar Rp. 198.450.114,00 atau 99.23% dari anggaran Rp. 200.000.000,00
- i. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah realisasinya sebesar Rp. 18.570.008.273,00 atau 99.40% dari anggaran Rp. 18.681.725.942,00
- j. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan realisasinya sebesar Rp. 197.843.682,00 atau 98.92% dari anggaran Rp. 200.000.000,00
- k. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik realisasinya sebesar Rp. 49.850.350,00 atau 99.70% dari anggaran Rp. 50.000.000,00
- l. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga realisasinya sebesar Rp. 199.210.000,00 atau 99.60% dari anggaran Rp. 200.000.000,00

3.1.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Penyerapan anggaran urusan perumahan dan kawasan permukiman dengan alokasi dan realisasi anggaran jika dibandingkan dengan target belum mencapai 100%, hal ini disebabkan oleh beberapa pekerjaan paling dominan mempengaruhi realisasi anggaran, diantaranya :
 - a. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor untuk belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan pemeliharaan lapangan (Mobil Pengangkut Material (Hio 300 Dutro 130 HD 6,8 PS bak Drop Side Platform + Crane Kap 3 Ton)) dan belanja modal peralatan mesin-pengadaan kendaraan bermotor khusus (Mobil Toilet (Long Chasis - Super VVIP)) tidak diserap, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Parasarana KP#B untuk pekerjaan penyusunan SOP Pemeliharaan (kebersihan, Taman dan



Sarana Bangunan Penunjang), Kawasan Banten Lama TA. 2020, SOP Pemeliharaan (Kebersihan, taman dan sarana bangunan penunjang), kawasan KP3B TA. 2020 dan Sertifikasi Uji Kelayakan Lift SKPD Terpadu tidak diserap, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi (Anggaran Perubahan)

- c. Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Perumahan tidak terserap dikarenakan waktu pekerjaan tidak mencukupi, diantaranya pekerjaan :
 1. Peningkatan Kualitas PSU Masjid di Kel. Sukajaya Kec. Curug Kota Serang Rp.100.000.000,00
 2. Peningkatan Kualitas PSU Masjid Kp. Gowok Sentul Kel. Sukajaya Kec. Curug Kota Serang Rp. 175.000.000,00
 3. Peningkatan Kualitas PSU Masjid Kp. Tegal Desa Cikoneng Kec. Anyar Kab. Serang Rp. 190.000.000,00
 4. Peningkatan Kualitas PSU Masjid Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang Rp. 180.000.000,00
 - d. Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan pekerjaan Pengawasan bantuan PSU tidak terserap, hal ini disebabkan fisiknya tidak dilaksanakan
 - e. Kegiatan Penatagunaan Pengembangan Perumahan pekerjaan pembangunan PSU perumahan tidak terserap, dikarenakan pembebasan lahannya baru selesai
- 2) Penyerapan anggaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan alokasi dan realisasi anggaran jika dibandingkan dengan target belum mencapai 100%, hal ini disebabkan oleh beberapa pekerjaan paling dominan mempengaruhi realisasi anggaran, diantaranya :
- a. Kegiatan pengelolaan gedung strategis provinsi pekerjaan pembangunan gedung OPD dan Infrastruktur dasar progress fisiknya hanya mencapai 92,09% dan diputus kontrak, dan pembayarannya disesuaikan dengan progress fisiknya



- b. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan Dikawasan Strategis Provinsi untuk pekerjaan pembangunan stadion di kawasan sport centre (multiyears) dan pekerjaan Penataan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman di Kawasan Strategis Kab. Lebak (Jalan Lingkungan Desa Cikatomas, Kec. Ciligrang), putus kontrak sehingga belum terserap dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi
 - c. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan Air Bersih, antara lain :
 - pekerjaan pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Desa Sukamanah Kec. Menes kab. Pandeglang tidak diserap, dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi
 - pekerjaan Pembangunan WTP Sindang Heula + Reservoir Pipa Distribusi (92,53%) yang belum selesai karena adanya keterlambatan pengiriman alat penunjang WTP, sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan finishing pada WTP, reservoir dan pembuatan jalan beton
 - d. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan persampahan pekerjaan pembangunan TPA persampahan regional (TPST) Bojong Menteng, batal kontrak sehingga tidak diserap karena terjadi penolakan pembangunan TPA persampahan dari warga setempat
 - e. Kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis infrastruktur keciptakaryaan pekerjaan Kajian Pembangunan Landmark & RTH Di Kawasan Strategis Provinsi Banten, SID/DED Penataan Infrastruktur Sarana Prasarana Keciaptakaryaan Pada Kawasan Startegis, AMDAL/ UKL-UPL Sport Center, AMDAL/ UKL-UPL WTP Sindang Heula dan AMDAL banten Lama Skala Kota dan Kab. Serang, hal ini disebabkan waktu pelaksanaan tidka mencukupi
- 3) Realisasi belanja modal Pengadaan Lahan Jalan Akses TPST Bojong Menteng (135,500 m²), Biaya Ukur, Pemeriksaan Tranah dan Sertifikasi oleh BPN, Biaya Operasional dan Pendukung



Penyelenggaraan Pengadaan Tanah (3% X 108.000.000), tidak diserap karena pembangunan TPST tidak dilaksanakan

Solusi

Solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir permasalahan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut untuk periode ke depan antara lain, sebagai berikut :

1. Lebih cermat dalam menganggarkan suatu item pekerjaan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan pekerjaan;
2. Lebih cermat dalam menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan kondisi yang ada;
3. Persiapan pengadaan lahan lebih matang/intensif;
4. Perlunya perencanaan yang lebih akurat dalam menentukan harga satuan dengan melakukan survey harga pasaran setempat

3.1.4 Sisa Anggaran SILPA

Jumlah anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adakah sebesar Rp. 582.287.411.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat ratusSebelas Ribu rupiah*) sedangkan yang terserap adalah sebesar Rp.438.496.389.875,94,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Empat ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan ratus Tujuh Puluh Lima rupiah*) atau 75.31% dari pagu anggaran.

Adapun jumlah anggaran yang tidak terserap (SILPA) tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 143.791.021.124,06 (*Seratus Empat puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Empat rupiah*) atau 24.69% dari pagu anggaran.



Rekapitulasi sisa anggaran (SILPA) dan Permasalahan Program Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten ditampilkan dalam tabel berikut ini :



**Tabel 3.21 LAPORAN PREDIKSI SILPA ANGGARAN PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	KEGIATAN/TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	SISA ANGGARAN		JUMLAH PREDIKSI SILPA (Rp.)	KET.
			PAGU TIDAK DIGUNAKAN (Rp.)	SISA KONTRAK (Rp.)		
1	2	3	4	5		6
I	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	144,395,822,086	1,023,500,000	-	13,723,128,878	
	1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	41,842,774,000	-	-	813,082,832	
	2 Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	4,689,261,250	-	-	750,647,530	
	3 Penatagunaan Kawasan Permukiman	2,110,588,000	-	-	102,547,700	
	4 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	6,481,403,700	98,500,000	-	253,842,133	Pekerjaan Pengawasan Bantuan PSU tidak diserap, dikarenakan fisiknya tidak dilaksanakan
	5 Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	47,085,035,136	-	-	1,512,288,632	Anggaran yang tidak dilaksanakan, karena tidak cukup waktu pelaksanaan, diantaranya : 1. Peningkatan Kualitas PSU Masjid di Kel. Sukajaya Kec. Curug Kota Serang Rp.100.000.000,00 2. Peningkatan Kualitas PSU Masjid Kp. Gowoj Sentul Kel. Sukajaya Kec. Curug Kota Serang Rp. 175.000.000,00 3. Peningkatan Kualitas PSU Masjid Kp. Tegal Desa Cikoneng Kec. Anyar Kab. Serang Rp. 190.000.000,00 4. Peningkatan Kualitas PSU Masjid Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang Rp. 180.000.000,00



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN



	6	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	2,299,260,000	925,000,000	-	1,138,393,000	Pekerjaan jalan Lingkungan di Kawasan Huntap tidak dilaksanakan, dikarenakan tidak cukup waktu (baru selesai pembebasannya)
	7	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	39,887,500,000	-	-	9,152,327,051	
II		Program Keciaptakaryaan	119,433,751,770	15,090,500,000	4,900,183,776	30,336,588,458	
	8	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	69,045,000,000	-	-	7,696,018,467	Permasalahannya : 1. Pekerjaan pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Desa Sukamanah Kec. Menes kab. Pamdeglang tidak diserap, dikarenakan tidka cukup waktu pelaksanaan 2. Pekerjaan Pembangunan WTP Sindang Heula + Reservoir Pipa Distribusi (92%), dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman alat penunjang WTP, sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan finishing pada WTP, reservoir dan pembuatan jalan beton. Proges Fisik 92,53%
	9	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	4,909,000,000	-	-	399,693,007	
	10	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	15,559,000,000	11,000,000,000	-	11,096,124,306	Pekerjaan Pembangunan TPA Persanpahan Regional (TPST Bojong Menteng) (bobot 70,70%), batal kontrak (force Majer) sehingga tidak diserap karena adanya penolakan pembangunan TPA persampahan dari warga setempat



	11	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	14,804,432,480	2,530,000,000	-	3,003,941,060	Anggaran tidak digunakan pada pekerjaan . Kajian Pembangunan Landmark & RTH Di Kawasan Strategis Provinsi Banten 2. SID/DED Penataan Infrastruktur Sarana Prasarana Keciaptakaryaan Pada Kawasan Startegis 3. AMDAL/ UKL-UPL Sport Center 4. AMDAL/ UKL-UPL WTP Sindang Heula 5. AMDAL banten Lama Skala Kota dan Kab. Serang
	12	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	15,116,319,290	1,560,500,000	4,900,183,776	8,140,811,618	Sisa anggaran dari pekerjaan Pengadaan Lahan Perluasan Kawasan KP3B awalnya seluas 13,500 m2 , setelah hasil pengukuran oleh BPN menjadi seluas 12,633 m2
III		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	260,449,601,144	80,000,000,000	-	92,211,346,166	
	13	Pengelolaan gedung strategis Provinsi	121,039,171,300	-	-	82,462,863,181	Pekerjaan Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar (92.09 %), dikarenakan keterlambatan dalam pengerjaan dikarenakan diawal terdapat keterlambatan proses lelang dan adanya aksi warga terkait lahan sekitar gedung OPD sehingga menyebabkan pekerjaan terlambat (finishing dan lanscape).
	14	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	134,454,875,000	80,000,000,000	-	9,238,750,865	1. Pekerjaan Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre (Multiyears) batal kontrak , belum dilaksanakan pada TA. 2019 2. Penataan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman di Kawasan Strategis Kab. Lebak (Jalan Lingkungan Desa Cikatomas, Kec. Ciligrang), dikarenakan keterlambatan dalam pengerjaan karena terkendala cuaca, tenaga kerja dan material pada pertengahan dan akhir pengerjaan
	15	Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	4,955,554,844	-	-	509,732,120	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN



IV	Program Tata Kelola Pemerintahan	40,333,236,000	1,675,000,000	-	5,765,410,497	
16	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	169,000,000	-	-	55,000	
17	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,040,396,000	-	-	105,202,700	
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	4,399,000,000	1,650,000,000	-	1,848,859,849	Anggaran tidak digunakan pada belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan pemeliharaan lapangan sebesar Rp. 800,000,000 dan belanja modal peralatan mesin-pengadaan kendaraan bermotor khusus sebesar Rp. 850,000,000
19	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	3,141,000,000	-	-	497,833,700	
20	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	15,230,853,000	-	-	1,861,959,266	
21	Peningkatan Kapasitas Aparatur	154,000,000	25,000,000	-	53,621,400	Anggaran tidak digunakan untuk pengiriman Diklat Teknis/Kursus Singkat/Pelatihan) pada Aparatur Dinas (Rp. 5,000,000 x 5 orang x 1 tahun)
22	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	280,000,000	-	-	82,218,382	
23	Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Perpustakaan	134,000,000	-	-	52,290,000	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN



24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B	15,160,987,000	-	-	1,247,095,200	1. SOP Pemeliharaan (kebersihan, Taman dan Sarana Bangunan Penunjang), Kawasan Banten Lama TA. 2020, SOP Pemeliharaan (Kebersihan, taman dan sarana bangunan penunjang), kawasan KP3B TA. 2020 dan Sertifikasi Uji Kelayakan Lift SKPD Terpadu tidak diserap, dikarenakan tidak cukup waktu (Anggaran Perubahan) 2. Pemeliharaan Bangunan Air (Kolam Retensi II), dikarenakan Pekerjaan tidak selesai pada waktunya 3. Pemeliharaan Bangunan Air (Kolam Retensi III), dikarenakan Pekerjaan tidak selesai pada waktunya 4. Pemeliharaan / Penataan Taman Badak KP3B, dikarenakan tidak ada penyedia yang memenuhi syarat
25	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	624,000,000	-	-	16,275,000	
JUMLAH BL + BTL		564,612,411,000	97,789,000,000	4,900,183,776	142,036,473,999	



BAB IV

PENUTUP

Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah memiliki makna sebagai wujud nyata bentuk pelaksanaan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang Perumahan, Permukiman dan Keciptakaryaannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Di masa mendatang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Upaya yang terus ditingkatkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten akan melakukan berbagai langkah



koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan pendayagunaan aparatur negara.

Pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menetapkan empat rencana strategis yang tercantum dalam dokumen Perencanaan Kinerja. Keempat rencana strategis tersebut meliputi :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan
2. Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan
3. Program Keciaptakaryaan
4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Ketercapaian kinerja rencana strategis tersebut di atas dapat dilihat dari keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian beberapa indikator kinerja yang akan dicapainya. Pengukuran kinerja per indikator kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Uraian Faktor Pencapaian/ Ketidaktercapaian/ Pelampauan Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	3.00	2.69	89.50%	Belum tercapai, Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan pemeliharaan lapangan (Mobil Pengangkut Material (Hio 300 Dutro 130 HD 6,8 PS bak Drop Side Platform + Crane Kap 3 Ton)) dan belanja modal peralatan mesin-pengadaan kendaraan bermotor khusus (Mobil Toilet (Long Chasis - Super VVIP)) tidak diserap, dikarenakan gagal lelang. Dan Belanja Pengiriman Kursus-kursus Pelatihan Singkat/ Pelatihan pada Aparatur Dinas hanya terlaksana 50%, hal tersebut dikarenakan adanya kursus-kursus pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh BPSPDM Provinsi Banten.



2	Program Penyelenggaraa n Kawasan Permukiman dan Perumahan	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	203.20	101.16	49.78%	Tidak tercapai, dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga terdapat prioritas penanganan yang dilaksanakan.
	Program Penyelenggaraa n Kawasan Permukiman dan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	85.18	93.13	109.33%	Melampaui target, data berdasarkan capaian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Maret Tahun 2019
3	Program Keciptakarya	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)	76.15	73.68	96.76%	Tercapai, data berdasarkan capaian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun 2019
	Program Keciptakarya	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)	75.57	79.71	105.48%	Melampaui target, data berdasarkan capaian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun 2019
	Program Keciptakarya	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	20.00	0.00	-	Tidak tercapai, dikarenakan pekerjaan tidak dilaksanakan yang disebabkan oleh penolakan untuk pembangunan TPST dari masyarakat.
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	50.00	39.89	79.78%	Belum mencapai target, pekerjaan pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre (Multiyears) belum dilaksanakan pada TA. 2019.
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	69.00	62.56	90.67%	Belum mencapai target, terbangun 5 gedung strategis Provinsi. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan pada pekerjaan minor. Pekerjaan Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar (90 %), penataan tugu batas provinsi (20%), Pekerjaan peningkatan rumah korem (10%), terlambat dalam proses lelang.

Kiranya LAKIP Pemerintah Provinsi Banten Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sendiri, LAKIP Provinsi Banten bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

